

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN
RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK
(Studi Kasus Kebun Raya Gunung Tidar Kota Magelang)**

SKRIPSI

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh :

FITRIA ULFARISA

2106016142

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2025

NOTA PEMBIMBING

Lamp :

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada.

Yth. Dekan FISIP

UIN Walisongo Semarang

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi dari mahasiswa:

Nama : Fitria Ulfarisa

NIM : 2106016142

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik (Studi Kasus Kebun Raya Gunung Tidar Kota Magelang)

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 12 Juni 2025

Pembimbing

M. Nuglir Bariklana, M.Si

NIP. 198505022019031007

SKRIPSI

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik (Studi Kasus Kebun Raya Gunung Tidar Kota Magelang)

Disusun oleh

Fitria Ulfarisa

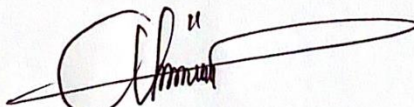
NIM. 2106016142

Telah dipertahankan di depan majelis penguji pada tanggal 19 Juni 2025 dan
telah dinyatakan LULUS

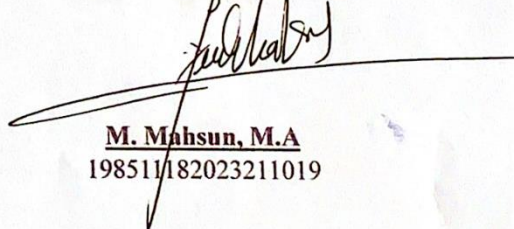
Susunan Dewan Penguji


M. Nuqlir Bariklana, M.Si
NIP. 198505022019031007

Penguji I


Prof. Dr. Ahwan Fanani, M.Ag
NIP. 197809302003121001

Penguji II


M. Mahsun, M.A
198511182023211019

Pembimbing


M. Nuqlir Bariklana, M.Si
NIP. 198505022019031007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini, saya Fitria Ulfarisa menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik (Studi Kasus Kebun Raya Gunung Tidar Kota Magelang)”** merupakan hasil karya penulisan sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya pihak lain yang diajukan guna memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang ataupun di lembaga pendidikan tinggi lainnya. Pengetahuan dan informasi yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka. Apabila ditemukan unsur-unsur plagiarisme di dalam tulisan skripsi ini, maka saya siap bertanggung jawab dan siap menerima konsekuensi yang ada. Terima Kasih.

Semarang, 12 Juni 2025

Penulis



Fitria Ulfarisa

NIM. 2106016142

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik (Studi Kasus Kebun Raya Gunung Tidar Kota Magelang) dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti.

Terselesaikannya skripsi ini merupakan suatu nikmat dan kebanggaan tersendiri bagi penulis. Penyusunan skripsi ini bertujuan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dalam penelitian. Meskipun demikian, atas usaha dan kerja keras serta pihak-pihak yang telah memberikan arahan, dukungan, dan dorongan maka skripsi ini dapat selesai dengan baik. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Nizar, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan segenap pimpinan di UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan dan menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Prof. Dr. Imam Yahya. M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sekaligus merupakan motivator yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam proses perkuliahan.
3. Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si selaku Kepala Program Studi Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang serta selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai dengan baik.

4. Masrohatun, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Politik yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis selama proses pembuatan skripsi.
5. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu kepada penulis serta bantuan selama berproses di perguruan tinggi ini.
6. Ayah, Ibu, dan Kakak penulis yang selama ini telah mendidik penulis dan memberikan nasihat, motivasi, serta tak luput dengan do'a yang selalu dipanjatkan pada Allah SWT, memberikan dukungan baik moral maupun material sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, dan terima kasih atas kasih sayang tiada henti sampai saat ini.
7. Teman-teman penulis Alfiatun Musyarofah, Risa Utami, Abdi Hannan, Erika Cahya Endah, Teman-teman KKN Nusantara Bali 2024, Teman-teman DEMA FISIP 2024, Teman-teman FSC 2024 dan seluruh pihak yang telah memberikan do'a, dukungan, bantuan, dan menemani penulis dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Mohon maaf penulis sampaikan apabila dalam penyusunan skripsi masih terdapat kekurangan, adanya kritik dan saran sangat diperlukan oleh penulis agar nantinya menjadi bahan evaluasi dan meningkatkan kualitas dari penulis. Demikian, ucapan terima kasih yang penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang berjasa dalam menyelesaikan kepenulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr.Wb

MOTTO

“Live your life as if everything is designed for your good”

~Jalaluddin Rumi

ABSTRAK

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu unsur penting sebagai infrastruktur hijau dan ruang publik. Komposisi RTH yang ideal penting untuk mencapai pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang luas wilayah Kota wajib mempunyai RTH Publik 20%. Pemenuhan RTH Publik 20% tentu terdapat kerjasama antara pemerintah serta partisipasi masyarakat. RTH Publik di Kota Magelang merupakan satu diantara 35 kota/kabupaten yang ada di Jawa Tengah RTH Publiknya terpenuhi 24,22 %. Oleh karena itu, studi ini dilakukan guna menjawab dua pertanyaan penelitian : 1) Bagaimana tahapan partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kebun Raya Gunung Tidar? 2) Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kebun Raya Gunung Tidar Kota Magelang?.

Teori yang digunakan untuk menjawab dua pertanyaan penelitian diatas adalah teori Partisipasi Masyarakat yang ditemukan oleh Cohen dan Uphoff (1980). Menurut Cohen dan Uphoff (1980) partisipasi digambarkan menjadi empat tahap yaitu pengambilan keputusan, implementasi, realisasi manfaat, dan evaluasi. Konsep teori ini digunakan untuk meneliti bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH Publik di Kebun Raya Gunung Tidar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus dalam kualitatif ialah penafsiran realita sosial politik yang meletakkan peneliti sebagai instrumen penelitian untuk memahami dan menggali data-data yang bersifat deskriptif yang dikumpulkan dari proses observasi lapangan, interview dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini dirangkum menjadi dua poin penting. *Pertama*, masyarakat turut terlibat mulai dari tahap implementasi pada pengelolaan RTH Kebun Raya Gunung Tidar. *Kedua*, kesempatan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dan partisipasi memberikan keuntungan bagi masyarakat menjadi faktor pendukung, namun terdapat indikasi suatu keputusan yang kurang sejalan dengan masyarakat. Hal ini membentuk kebijakan yang didominasi dengan kepentingan-kepentingan elit politik. Selain itu, adanya masyarakat yang disibukkan oleh pekerjaan profesionalnya menjadi tantangan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan RTH Publik Kebun Raya Gunung Tidar.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Ruang Terbuka Hijau Publik, Pengelolaan RTH

ABSTRACT

Green Open Space (GOS) is one of the important elements as green infrastructure and public space. The ideal GOS composition is important to achieve sustainable urban development. In accordance with the mandate of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, the area of the City must have 20% Public GOS. Fulfillment of 20% Public GOS certainly involves cooperation between the government and community participation. Public GOS in Magelang City is one of 35 cities/regencies in Central Java whose Public GOS is fulfilled by 24.22%. Therefore, this study was conducted to answer two research questions: 1) What are the stages of community participation in the process of managing Green Open Space in the Gunung Tidar Botanical Gardens? 2) What are the supporting and inhibiting factors in the management of Green Open Space in the Gunung Tidar Botanical Gardens in Magelang City?

The theory used to answer the two research questions above is the Community Participation theory discovered by Cohen and Uphoff (1980). According to Cohen and Uphoff (1980) participation is described as four stages, namely decision making, implementation, realization of benefits, and evaluation. This theoretical concept is used to examine how community participation in the management of Public Green Open Space in the Gunung Tidar Botanical Gardens. The research method used is a qualitative method with a case study approach. A case study in qualitative is an interpretation of socio-political reality that places researchers as research instruments to understand and explore descriptive data collected from the process of field observation, interviews and documentation.

The results of this study are summarized into two important points. First, the community is involved starting from the implementation stage in the management of the Gunung Tidar Botanical Gardens RTH. Second, the opportunities given by the government to the community and participation provide benefits to the community as supporting factors, but there are indications of a decision that is not in line with the community. This forms a policy that is dominated by the interests of the political elite. In addition, the existence of a community that is busy with their professional work is a challenge for Community Participation in the management of the Gunung Tidar Botanical Gardens Public RTH

Keywords: Community Participation, Public Green Open Space, Green Open Space Management

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	6
1. Ruang Terbuka Hijau	7
2. Partisipasi Masyarakat dalam Ruang Terbuka Hijau	9
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	15
2. Sumber dan Jenis Data	16
3. Teknik Pengumpulan Data	17
4. Teknik Analisis Data	19
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II.....	23
KERANGKA TEORI.....	23
A. Definisi Konseptual	23
1. Partisipasi Masyarakat	23
2. Ruang Terbuka Hijau	24

B. Kerangka Teori Partisipasi Masyarakat Cohen dan Uphoff 1980	28
1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan (<i>Participation in decision making</i>)	28
2. Partisipasi dalam implementasi (<i>Participation in implementation</i>).....	29
3. Partisipasi dalam manfaat (<i>Participation in benefits</i>).....	30
4. Evaluasi (<i>Evaluation</i>).....	30
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat.....	33
BAB III	35
POTRAIT OBJEK PENELITIAN KOTA MAGELANG.....	35
A. Kondisi Geografis	35
B. Kondisi Topografis	37
C. Kondisi Demografis	38
D. Kondisi Ekonomi	39
E. Kondisi Sosial	41
F. Kondisi Politik	43
H. Lanskap RTH Publik Kebun Raya Gunung Tidar.....	46
I. Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau Publik	50
BAB IV	52
PROSES PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK KEBUN RAYA GUNUNG TIDAR KOTA MAGELANG.....	52
A. Inisiasi perencanaan Hutan Kota menjadi Kebun Raya Gunung Tidar	52
1. Peralihan status Hutan Kota menjadi Kebun Raya	53
2. Pembentukan tim moneyv.....	55
B. Kontribusi Sumber Daya dalam Aspek Pembangunan Fasilitas Kebun Raya Gunung Tidar.....	58
1. Kontribusi tenaga berupa keikutsertaan dalam pembangunan jalan menuju puncak.....	58
2. Adanya pekerja lokal di Kebun Raya Gunung Tidar	60
C. Kebun Raya Gunung Tidar Sebagai Zona Wisata, Pendidikan, dan Sumber Pendapatan.....	65

1. Masyarakat yang bekerja dan menerima gaji lebih banyak dari adanya Kebun Raya Gunung Tidar.	65
2. Kebun Raya sebagai sarana olahraga, wisata, dan pendidikan	66
3. Adanya masyarakat yang berjualan di Kawasan Kebun Raya Gunung Tidar.....	68
D. Evaluasi Rutin Tim Monev dalam Pengelolaan RTH Kebun Raya Gunung Tidar yang Berkelanjutan	70
BAB V	75
FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN RTH KEBUN RAYA GUNUNG TIDAR KOTA MAGELANG	75
A. Faktor Pendukung Partisipasi Masyarakat	75
1. Adanya kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk turut serta mengelola RTH Kebun Raya Gunung Tidar.....	75
2. Partisipasi memberikan keuntungan bagi masyarakat	77
B. Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat	79
1. Adanya proses pengambilan keputusan sepihak dari UPT Kebun Raya Gunung Tidar	79
2. Adanya masyarakat yang disibukkan oleh pekerjaan profesionalnya sehingga membatasi keterlibatan partisipasi dalam pengelolaan RTH.....	83
BAB VI	86
PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88

DAFTAR GAMBAR

Figure 1 RTH Publik, Kebun Raya Gunung Tidar Kota Magelang	26
Figure 2 RTH Privat, Halaman Rumah	26
Figure 3 Peta Wilayah Kota Magelang	36
Figure 4 Rapat Tim Monev	56
Figure 5 Data Karyawan Kebun Raya Gunung Tidar 2024	62
Figure 6 Kondisi Rapat evaluasi di UPT Kebun Raya Gunung Tidar	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Luas Wilayah Per Kecamatan di Kota Magelang.....	37
Tabel 2 Statistik Kependudukan Kota Magelang 2022-2024	38
Tabel 3 Persebaran Demografi Kota Magelang berdasarkan Mata Pencaharian Penduduk Tahun 2023-2024.....	39
Tabel 4 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Magelang 2022-2024	41
Tabel 5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Magelang.....	44
Tabel 6 Pemangku Kepentingan dalam Evaluasi Pengelolaan RTH Kebun Raya Gunung Tidar	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan perkotaan sebagai infrastruktur hijau dan ruang publik. Komposisi RTH yang ideal sangat penting untuk mencapai pembangunan perkotaan yang berkelanjutan sehingga menciptakan lingkungan perkotaan yang seimbang dan layak huni. RTH memiliki banyak fungsi, termasuk pelestarian lingkungan, rekreasi, interaksi sosial, dan pengembangan ekonomi (Hendriani, 2016; Nugroho, 2015; Mahendra, 2022; Fitriyah & Purwanto, 2020). Secara keseluruhan RTH berperan penting dalam mendukung aspek ekologi, sosial budaya, dan estetika perkotaan, dan meningkatkan kualitas hidup penduduk kota. Sebagai salah satu komponen penting dalam pembangunan perkotaan berkelanjutan, RTH membantu mengurangi krisis lingkungan dan mencerminkan identitas kota (Mahendra, 2022)

Pada dasarnya, membangun ruang publik pasti bergantung pada proses politik yang dijalankan oleh pemerintah. Idealnya pembangunan seringkali dipenuhi dengan isu lingkungan demi kepentingan-kepentingan politik. Pembangunan yang masif justru seringkali mengesampingkan keseimbangan ekologi atau lingkungan di perkotaan, termasuk melupakan pentingnya menyisakan area hijau atau Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pada kaitannya soal kepentingan, aspek lingkungan kerap kali dikesampingkan oleh pemerintah. Meninjau lebih spesifik terkait permasalahan di perkotaan tentang lingkungan hidup meliputi pembahasan soal polusi udara, pengelolaan sampah, kualitas air tanah, pengelolaan air limbah, minimnya lahan penyerapan air, penurunan permukaan dataran tanah akibat konsumsi air tanah berlebih (Hapsari Wahyuningsih, 2018). Adanya permasalahan lingkungan kota tersebut, perlu instrumen sebagai upaya daya dukung lingkungan dalam mengatasi masalah lingkungan, salah satunya adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Di satu sisi, sangat dibutuhkan adanya partisipasi masyarakat dari segi pemanfaatan dan pengelolaan RTH. Sehingga, pemanfaatan RTH lebih maksimal. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ketersediaan RTH dapat meningkatkan alih fungsi lahan terbuka menjadi kawasan terbangun (S. R. Sari et al., 2016). Persepsi dari masyarakat terkait RTH dapat menjadi acuan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Partisipasi masyarakat sebagai instrumen penting bekerjanya masyarakat sipil pada setiap proses perencanaan program pembangunan, implementasi sampai pengawasan kebijakan.

Penelitian tentang ruang terbuka hijau dan politik lingkungan telah dikaji dan diteliti oleh para sarjana sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Adiyanta, (2018), Indah Yulia Sari, (2021), Lily Andayani dkk, (2023), Ilham Tri Sulistryo dkk, (2024) memfokuskan kajian dalam implementasi kebijakan RTH. Hasilnya adalah RTH memberikan kontribusi yang signifikan terhadap citra kota, berfungsi sebagai landmark dan ruang ekspresi publik. Namun, implementasi kebijakan RTH menghadapi tantangan seperti lemahnya pengawasan, mahalnya harga lahan, dan kurangnya kesadaran masyarakat (Wijayanto & Hidayati, 2017). Pengelolaan RTH dapat dipengaruhi oleh dinamika politik dan hubungan kekuasaan antara pemerintah dan sektor swasta, yang terkadang menyebabkan implementasi kebijakan tidak konsisten (Andriyani, 2023). Maka dari itu, banyak kota yang kesulitan mencapai cakupan RTH yang optimal. Pemerintah daerah lebih berfokus pada faktor kelembagaan, tata kelola, implementasi manajemen, dan pemberdayaan masyarakat. Padahal nyatanya, untuk meningkatkan implementasi RTH dapat dengan mengembangkan rencana tata ruang yang rinci, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat, dan mencari sumber pendanaan alternatif (Handayani et al., 2021).

Secara garis besar, terdapat kesamaan topik kajian peneliti terdahulu yang telah diulas sebelumnya dengan penulis yaitu Ruang Terbuka Hijau. Namun, dalam hal ini yang menjadi arah kajian penulis adalah Ruang

Terbuka Hijau Publik. RTH Publik merupakan Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah melalui kerjasama dengan masyarakat dan swasta guna kepentingan umum. Selama ini, penelitian terkait Ruang Terbuka Hijau terutama berfokus pada ketersediaan, peningkatan luasan, penetapan kebijakan, dan fungsi RTH (Suciyani, 2018). Padahal, dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau juga perlu adanya peran masyarakat. Oleh karena itu, fokus kajian ini adalah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik. Kajian tersebut dilaksanakan di Kebun Raya Gunung Tidar, Kota Magelang. Pengelolaan dan penataan Ruang Terbuka Hijau Publik mutlak diperlukan melibatkan swasta serta masyarakat karena hal ini menjadi komunikasi yang intensif antara para *stakeholder*.

Pemerintah Kota Magelang dalam pemenuhan RTH memberikan akses keterlibatan masyarakat serta pihak swasta dalam implementasi penataan RTH di Kota Magelang. Penataan taman yang ada di setiap kecamatan dan kelurahan pun melibatkan adanya peran masyarakat. Adapun keterlibatan pihak swasta seperti Bank Jateng, Bank BRI, Toko Emas Mustika Gold, dan Perumahan Senopati Residence yaitu melalui kegiatan CSR (*Cooperation Social Responsibility*) dengan menyumbangkan pot dan tanaman yang dipasang dipinggir jalan trotoar. Oleh karena itu, Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Magelang menurut Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Dinas Pusdataru) Jawa Tengah merupakan satu diantara 35 kota/kabupaten yang ada di Jawa Tengah RTH Publiknya terpenuhi 24,22 %. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dimana dari luas wilayah Kota Magelang wajib mempunyai RTH Publik 20%. Tentu adanya pemenuhan RTH ini juga terdapat kerjasama antara pemerintah serta partisipasi masyarakat.

Salah satu kawasan dalam pemenuhan RTH Publik yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung adalah Kebun Raya Gunung Tidar Kota Magelang. Pada awalnya, Gunung Tidar adalah hutan kota. Namun,

pemerintah Kota Magelang memulai pembangunan kebun raya pada tahun 2019, dan pada tanggal 12 Januari 2021, Kawasan Gunung Tidar resmi beralih menjadi Kebun Raya Gunung Tidar (KRG T). Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kebun Raya, taman didefinisikan sebagai kawasan konservasi tumbuhan secara ex situ yang memiliki koleksi tumbuhan yang terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata, dan layanan lingkungan.

Saat ini, Kebun Raya Gunung Tidar memiliki luas kawasan mencapai 701.674 m² dengan puncak yang berada di ketinggian 503 mdpl. RTH ini berada di tengah Kota Magelang yang merupakan Ruang Terbuka Hijau Publik terbesar dan ramai pengunjung karena selain menjadi RTH Publik juga sebagai objek wisata. Adanya Kebun Raya Gunung Tidar tergolong sentral bagi masyarakat yang membutuhkan ruang publik. Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan yang optimal demi menunjang kenyamanan dan keamanan pengunjung. Pengelolaan Kebun Raya Gunung Tidar menunjukkan gejala partisipasi didalamnya. Kegiatan partisipasi masyarakat tidak terlepas dari adanya bina lingkungan atau padat karya pemeliharaan kawasan. Adapun 50% lebih karyawan yang bekerja di Kebun Raya Gunung Tidar merupakan masyarakat sekitar. Selain itu, masyarakat juga berjualan di kawasan RTH Publik ini sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pengawasan terhadap pengelolaan Kebun raya Gunung Tidar ini, berada dibawah tanggung jawab UPT Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat sekitar RTH Publik. Namun, dalam pengelolaan RTH Publik di Kebun Raya Gunung Tidar belum berjalan sesuai dengan target dikarenakan hingga saat ini, Kebun Raya Gunung Tidar masih dalam proses pembangunan dan pengembangan terhadap zona koleksi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sebagai sebuah UPTD, ia belum memiliki kemampuan yang cukup, terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah dari Pemerintah Kota

Magelang. Akibatnya, sangat terbatas dan sulit untuk berkembang. Persoalan ini juga menghambat dalam peningkatan layanan, berkembangnya sarana dan prasarana untuk layanan pendidikan dan wisata, dan peningkatan daya beli. Selain itu, terdapat masyarakat yang membuang dan membakar sampah di area kawasan Kebun Raya Gunung Tidar, hal ini menjadi persoalan yang cukup serius, karena dikhawatirkan menimbulkan kebakaran. Masyarakat masih rendah kesadaran akan hal ini. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama dari pemerintah dan masyarakat untuk pengelolaan RTH Kebun Raya Gunung Tidar lebih optimal.

Keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting dalam pengelolaan RTH publik. Setidaknya mengurangi adanya proses timbulnya konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang. Apabila suatu tindakan diambil guna kepentingan masyarakat, dan berharap masyarakat taat, maka masyarakat juga harus diberikan kesempatan dalam mengembangkan RTH. Maka dari itu, kajian ini menarik untuk dibahas yang termuat dalam judul “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik (Studi Kasus Kebun raya Gunung Tidar, Kota Magelang)”. Topik tersebut perlu dikaji karena selama ini Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau lebih banyak berfokus pada kebijakan pemerintah atau aspek ekologis RTH, sedangkan penelitian ini berupaya melihat peran masyarakat dalam pengelolaan RTH secara lebih mendalam. Padahal, adanya elemen masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan lingkungan kota yang berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengklasifikasikan menjadi beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana tahapan partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kebun Raya Gunung Tidar?
2. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kebun Raya Gunung Tidar Kota Magelang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa tahapan partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kebun Raya Gunung Tidar Kota Magelang.
2. Untuk menganalisa faktor penghambat atau tantangan utama masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kebun Raya Gunung Tidar Kota Magelang

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh secara teoritis pada penelitian ini yaitu meliputi:

1. Dapat memberikan sumbangsih pengetahuan dalam pengembangan konseptual dan teori pada kajian Ilmu Politik.
2. Mendapatkan temuan baru terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang biasanya hanya dikaji dari sisi pemerintah.

Sementara, manfaat secara praktis dari penelitian ini yang diperoleh meliputi:

1. Bagi pemerintah, dapat menjadi bahan pertimbangan atau rekomendasi pada masalah Ruang Terbuka Hijau Publik terutama dalam partisipasi masyarakat Kebun Raya Gunung Tidar Kota Magelang .
2. Bagi masyarakat, dapat membantu memecahkan masalah atau polemik yang terjadi pada Kebun Raya Gunung Tidar Kota Magelang.
3. Bagi para peneliti yang lain, dapat dijadikan referensi atau rujukan sebagai bahan penyempurna bagi penelitian sebelumnya dan untuk penelitian yang akan datang.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggali informasi dari penelitian sebelumnya atau *literature review* sebelum melakukan studi penelitian sesuai dengan tema yang dibahas. Penulis perlu mengkaji dari penelitian terdahulu supaya dapat memposisikan hasil penelitian dari sudut pandang kajian yang berbeda. Topik terkait Ruang Terbuka Hijau sudah banyak

diteliti oleh sarjana terdahulu. Terdapat dua tema terkait topik yang akan dikaji yaitu Ruang Terbuka Hijau dan partisipasi masyarakat dalam Ruang Terbuka Hijau (RTH).

1. Ruang Terbuka Hijau

Isu Ruang Terbuka Hijau telah dibahas oleh para sarjana sebelumnya, yang berfokus dari sudut pandang pemerintah. Kajiannya terkait pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan yang menghadapi tantangan cukup signifikan. Dapat dilihat dari kajian studi yang berjudul *“Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu”* oleh Winda Amelia Vada (2015). Penelitian ini berfokus pada pemahaman peran dari pemerintah daerah dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau yang bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pemerintah daerah berkontribusi pada perencanaan, implementasi, pengawasan, dan proses pembuatan kebijakan terkait dengan pengembangan Ruang Terbuka Hijau. Temuan menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap kurangnya pembangunan ruang terbuka hijau. Padahal, lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang cukup strategis dalam pemeliharaannya sering diabaikan. Oleh karena itu, dengan pengelolaan dan integrasi RTH yang efektif dapat mengarah pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan (Vada, 2015).

Dalam pengembangan Ruang Terbuka Hijau, selain pemerintah yang berperan aktif, pasti terdapat dinamika dalam proses tersebut. Penelitian yang berjudul *“Analisis Politik Ruang Terbuka Hijau Studi Kasus di Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan”* oleh Abdillah Qomaru Zaman dan M. Zimamul Khaq (2023). Kepentingan antar aktor yang terlibat menimbulkan adanya dinamika praktik RTH. Hal ini menjadi fokus dalam kajian penelitian ini. Hasil dari studinya adalah pengembangan ruang terbuka hijau di Kabupaten Lamongan belum optimal, ditandai dengan rendahnya peran serta masyarakat, kurangnya

perhatian terhadap pemeliharaan, dan masih didominasi oleh ruang terbuka hijau milik swasta. Alokasi ruang terbuka hijau publik masih belum memadai, karena penataan ruang pemerintah lebih mengutamakan kepentingan kapitalis dan investor daripada pembangunan berkelanjutan dan kebutuhan masyarakat (Zaman & Khaq, 2023). Tak hanya di kabupaten lamongan, Ruang Terbuka Hijau di Surabaya juga terdapat dinamika politik dan hubungan kekuasaan antara pemerintah dan swasta, yang menyebabkan implementasi kebijakan tidak konsisten. Studi yang dikaji oleh Lusi Andriyani (2023) dengan judul *“Relasi Kuasa Pemerintah Surabaya dalam Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau”*. Implementasi kebijakan terkait RTH di Surabaya belum konsisten, di mana Pemerintah Kota menafsirkan peraturan tersebut dengan cara yang lebih memihak pada kepentingan kapitalis, sehingga menimbulkan konflik dengan DPRD, masyarakat, dan pengembang daripada ruang terbuka hijau dan perlindungan lingkungan (Andriyani, 2023)

Perencanaan serta pengelolaan harus jelas serta efektif dalam Ruang Terbuka Hijau. Salah satunya adalah dengan tata kelola. Studi yang dikaji oleh Nurliah dan Muh. Syariat Tajuddin (2020) yang berjudul *“Analisis Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pembangunan Kota di Kabupaten Majene”*. Peneliti mengungkapkan bahwa tata kelola ruang terbuka hijau di Majene dikelola sendiri. Tanggung jawab ini jatuh pada Unit Kerja Daerah (SKPD) yang mengawasi setiap jenis RTH sesuai dengan kriteria dan klasifikasi tertentu. Tantangan dalam tata kelola ruang terbuka hijau, seperti pengawasan yang tidak memadai dan perlunya peraturan khusus untuk melindungi area ini dari penyalahgunaan dan degradasi lingkungan. Oleh karena itu, dalam hal pengelolaan perlu adanya partisipasi masyarakat. Hal ini menjadi bukti bahwa tata kelola yang efektif perlu peran publik terutama dalam peningkatan kesadaran masyarakat itu sendiri (Nurliah & Tajuddin, 2020)

Penerapan kebijakan juga menjadi faktor pendorong pembangunan terutama Ruang Terbuka Hijau di Lhokseumawe yang dikaji oleh Yeni Mawaddah dan Anismar (2022) yang berjudul *“Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) terhadap Penataan Lingkungan Kota Lhokseumawe”*. Dalam studinya tersebut mengungkapkan bahwa Implementasi kebijakan RTH belum sepenuhnya terwujud. Ada kesenjangan yang signifikan dalam keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan ruang-ruang ini. Studi ini menyoroti bahwa banyak area hijau yang ditunjuk tidak dimanfaatkan secara efektif, yang mengarah ke masalah seperti pengabaian dan pemeliharaan yang buruk. Kajian ini juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam pengelolaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau. Implementasi yang efektif membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan penduduk setempat untuk memastikan bahwa daerah-daerah ini dilestarikan dan digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan (Mawaddah & Anismar, 2022)

2. Partisipasi Masyarakat dalam Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau dalam tahap pembangunan perlu adanya partisipasi dari masyarakat terutama dalam hal perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. Salah satunya, kajian dari Mutiara Lisa Allokendek, dkk (2019) berfokus pada perencanaan dan pemeliharaan RTH dengan judul *“Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Distrik Sario Kota Manado”*. Studinya ini mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pemeliharaan RTH di Kecamatan Sario cukup menjanjikan tetapi memerlukan keterlibatan pemerintah yang lebih proaktif. Kesadaran publik dan penyediaan sumber daya dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas inisiatif ruang hijau. Meskipun partisipasi masyarakat kuat, kolaborasi yang efektif dengan badan pemerintah

sangat penting untuk pembangunan RTH yang berkelanjutan (Allokendek et al., 2019)

Ruang Terbuka Hijau perlu adanya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan seperti penelitian yang dikaji oleh Isma Sari, dkk (2019) berjudul *“Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Rantau Baru di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan”*. Dalam hal ini penelitian menunjukkan bahwa meskipun masyarakat menghargai ruang terbuka hijau, partisipasi mereka dalam pemanfaatan dan pengelolaannya masih kurang. Hal ini terjadi karena pemerintah belum mengkomunikasikan pentingnya RTH secara efektif, sehingga masyarakat kurang adanya pemahaman terkait pentingnya Ruang Terbuka Hijau (I. Sari et al., 2019)

Tidak hanya Partisipasi Masyarakat dari segi pemanfaatan, Ruang Terbuka Hijau dari segi pengelolaan perlu diperhatikan. Hal ini dikaji oleh Agus Setiawan dan Dyah Widiyastuti (2018) mengenai *“Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta”*. Argumennya menunjukkan bahwa terdapat hasil yang menguntungkan mengenai keterlibatan komunal dalam pengelolaan ruang hijau publik, terdapat juga hambatan yang terkait dengan beragam modalitas penggunaan, pemeliharaan, dan distribusi sumber daya yang harus diselesaikan untuk pengelolaan berkelanjutan yang efektif (A. Setiawan & Widiyastuti, 2018). Hal serupa juga terjadi pada pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Jebres Kota Surakarta yang dikaji oleh Efi Indrajati, dkk (2024) berjudul *“Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kecamatan Jebres Kota Surakarta Tahun 2022”*. Dikatakan demikian karena studi ini dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau Publik terdapat beberapa tingkat partisipasi masyarakat, ada kesenjangan yang signifikan dalam ketersediaan ruang ini dibandingkan dengan standar yang disyaratkan. Ini menyoroti perlunya strategi manajemen yang lebih baik dan

peningkatan keterlibatan masyarakat di masa depan (Indrajati & Prihadi, 2024)

Biasanya, keterlibatan masyarakat dalam penataan Ruang Terbuka Hijau juga terdapat komunitas didalamnya yang ikut andil. Seperti kajian yang berjudul *“Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Gunung Anyar Surabaya”* oleh Nira Zhahfirah Puspitasari, dkk (2022). Studi ini menyoroti komunitas bernama Griyo Maos yang berperan aktif menjaga dan merawat lingkungan melalui pendidikan. Namun, terkait dengan kesadaran publik masih kurang dalam pemahaman umum tentang pentingnya pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (Puspitasari et al., 2022)

Partisipasi pemangku kepentingan sangat penting dalam pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) publik di kota-kota Indonesia. Studi ini menunjukkan bahwa keterlibatan multi-pemangku kepentingan sangat penting dalam pengelolaan RTH, dan bahwa kita harus mengatasi tantangan yang menghalangi partisipasi. Di Mataram, berbagai departemen pemerintah memainkan peran kunci. Seperti kajian yang berjudul *“Pemetaan Peran Serta Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan RTH Publik di Kota Mataram dengan Pendekatan Stakeholder Analysis”* oleh Joni Safaat Ardiansyah, dkk (2024). Kajian menemukan persoalan tentang tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan RTH Publik Kota Mataram yaitu minimnya pendanaan untuk pembebasan lahan dan potensi RTH Publik, serta ketidakmampuan stakeholder untuk berkolaborasi dan berkomunikasi secara efektif. Hal ini menghambat pencapaian RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah (Adiansyah et al., 2024). Adapun Taman Bungkul Surabaya merupakan salah satu kerja sama yang sukses antara pemerintah, badan usaha milik negara, dan masyarakat. Komitmen proses, partisipasi, motivasi, tujuan bersama, dan kepercayaan internal adalah kuncinya. Penelitiannya oleh Arviana Irmadella (2018) berjudul *“Model Kolaborasi Stakeholder dalam Pengelolaan Ruang Terbuka*

Hijau (RTH) Taman Bungkul Kota Surabaya”. Dalam penelitian ini, menunjukkan adanya komitmen saling percaya dari masing-masing aktor guna mencapai tujuan bersama dalam bingkai partisipasi. Oleh karena itu, kepercayaan internal dalam menentukan tindakan pengelolaan taman dapat mempermudah konsensus aktor kolaborasi (Irmadella, 2018).

Manajemen aset juga sebagai kerangka kerja partisipatif untuk mengelola aktivitas ekologis di ruang terbuka hijau perkotaan dengan melibatkan pemangku kepentingan pada sektor publik, swasta, dan pemerintah. Seperti kajian yang diteliti oleh A. Malik (2018) yang berjudul *“Peran Pemangku Kepentingan Terkait Pengelolaan Fungsi Ekologis Ruang Terbuka Hijau Perkotaan. Studi Kasus: Kota Depok, Indonesia”*. Pada kajian Ini menjelaskan manfaat ekologi utama dari ruang terbuka hijau perkotaan, seperti pengendalian polusi udara dan kebisingan, pelestarian keanekaragaman hayati, peningkatan kualitas udara, dan pengurangan efek panas perkotaan. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketersediaan RTH perkotaan di Kota Depok, seperti masalah, keterbatasan anggaran, perencanaan serta pelaksanaan proyek, kurangnya pengawasan, kurangnya lahan yang tersedia, dan rendahnya kesadaran masyarakat (Mangopa Malik, 2018).

Penulis telah mengkaji berbagai temuan penelitian dari para sarjana sebelumnya, terdapat perbedaan mengenai topik yang akan dikaji oleh penulis. Berdasarkan temuan artikel jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa peneliti sebelumnya berfokus pada bentuk partisipasi masyarakat dalam pemenuhan Ruang Terbuka Hijau dari perspektif pemerintah daerah. Namun, penulis akan mengkaji dari sudut pandang keterlibatan masyarakat dari segi tahapan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik khususnya Kebun Raya Gunung Tidar Kota Magelang.

F. Kerangka Teori

Partisipasi, sebagaimana didefinisikan oleh Cohen dan Uphoff mengartikulasikan partisipasi sebagai tindakan terlibat dalam proses

pengambilan keputusan, mengatur program, memperoleh manfaat, dan mengevaluasi efektivitas program. Intinya, partisipasi merupakan keterlibatan aktif dalam memenuhi peran atau berkontribusi pada kegiatan yang penting untuk pelaksanaan program. Menurut Cohen dan Uphoff partisipasi digambarkan menjadi empat tahap yang berbeda: pengambilan keputusan, implementasi, realisasi manfaat, dan evaluasi (Cohen & Uphoff, 1980)

Terdapat beberapa tahapan dalam yaitu meliputi :

a. Pengambilan Keputusan

Penetapan alternatif bersama masyarakat guna mencapai kesepakatan dari beragam gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi pada tahap pengambilan keputusan terdiri dari pengambilan keputusan awal, pengambilan keputusan berjalan, dan pengambilan keputusan operasional. Pengambilan keputusan awal dimulai dari melakukan identifikasi awal kebutuhan masyarakat dan solusi bagaimana kebutuhan tersebut akan dipenuhi. Pengambilan keputusan berjalan terdiri dari aktivitas merespons kebutuhan dan prioritas baru yang terkait dengan program/kegiatan. Pengambilan keputusan operasional lebih terkait pada organisasi lokal spesifik yang telah dibentuk karena adanya sebuah program atau organisasi yang berkaitan dengan program dalam sebuah usaha untuk melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program

b. Pelaksanaan

Mobilisasi sumber daya dan dana pada sebuah pelaksanaan program serta sebagai tolak ukur kesuksesan program. Masyarakat terlibat dalam pelaksanaan inisiatif dengan menyediakan sumber daya dan memfasilitasi koordinasi dengan entitas pemerintah. Kontribusi sumber daya dapat mencakup penyediaan energi, sumber daya keuangan, barang material, dan input informasi. Selanjutnya, anggota masyarakat dapat berpartisipasi dalam organisasi sukarela yang mengambil peran penting dalam menyelaraskan kegiatan mereka dengan proyek-proyek

partisipatif. Dengan melibatkan individu lokal dalam koordinasi proyek, masyarakat lokal tidak hanya diberdayakan menuju otonomi yang lebih besar melalui pengalaman pendidikan yang mereka temui selama proses partisipatif, tetapi mereka juga dapat memperoleh wawasan dan bimbingan yang signifikan mengenai tantangan dan keterbatasan lokal yang berdampak pada lintasan partisipasi.

c. Pengambilan Manfaat

Partisipasi berhubungan dengan kualitas dan kuantitas hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Manfaat material pada dasarnya adalah manfaat yang berada pada skala barang privat. Barang ini merupakan sesuatu yang berwujud dan dapat dikenali langsung oleh indra. Manfaat sosial adalah berupa barang publik. Dalam hal ini, keuntungan yang didapat dari sebuah program mampu diakses oleh semua masyarakat. Bentuk pengambilan manfaat sosial dapat berupa perbaikan pelayanan atau fasilitas publik yang lebih baik. Manfaat personal, berbeda dari manfaat material dan sosial, tetapi ini bukan berarti bahwa hal tersebut harus terjadi secara individu.

d. Evaluasi

Berhubungan dengan pelaksanaan program secara keseluruhan. Tahapan ini tujuannya guna mengetahui bagaimana pelaksanaan program berlangsung. Tahap evaluasi penting untuk dilakukan karena dapat menghasilkan umpan balik yang bisa mendorong peningkatan pelaksanaan. Evaluasi program yang dapat dilakukan masyarakat dalam proses partisipasi dapat terjadi melalui evaluasi secara langsung ataupun tidak langsung.

Tahapan yang diartikulasikan oleh Cohen dan Uphoff mengenai partisipasi didefinisikan berbagai dimensi keterlibatan partisipatif, pada intinya perbedaan dalam dimensi ini menghasilkan interpretasi partisipasi yang berbeda. Cohen dan Uphoff menegaskan bahwa peneliti dan pembuat kebijakan menunjukkan fokus yang tinggi pada modalitas pengambilan keputusan dan partisipasi evaluatif (Hutagalung, 2022). Sebaliknya,

administrator terutama menekankan sifat partisipasi mengenai perolehan manfaat, terutama yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Dwiningrum, 2011).

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penulis melakukan penelitian skripsi ini dengan kualitatif deskriptif, berarti bahwa data tidak menekankan pada angka tetapi akan dijelaskan dengan penjelasan dan gambar. Menurut Bogdan dan Biklen dalam sugiyono (2020:9), penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang meminta data deskriptif tentang tingkah laku dan ucapan orang yang diamati. Menurut Inranto dan Supono (2012:26), penelitian deskriptif adalah penelitian tentang fakta-fakta tentang popularitas saat ini. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis penelitian deskriptif pada penelitian kualitatif dengan menggunakan berbagai metode alamiah ini memiliki tujuan agar fenomena yang ada seperti tindakan, motivasi, perspsi dapat dipahami (Moleong, 2017).

Penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) merupakan jenis penelitian yang digunakan pada kajian penelitian. Penulis akan menggunakan penelitian lapangan karena data yang didapatkan akan lebih akurat dengan berinteraksi dan berpartisipasi secara langsung.

Pada penelitian ini, metode studi kasus (*case study*) akan digunakan oleh penulis. Menurut (Creswell, 2015), pendekatan kualitatif merupakan jenis penelitian dengan melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber secara mendalam supaya dapat menyelidiki sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus). Maka dari itu, perlu memastikan bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian ini sesuai dengan fenomena serta objek yang dikaji dengan analisis secara mendalam.

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang diambil oleh penulis yaitu kualitatif deskriptif dengan penelitian lapangan melalui pendekatan

studi kasus. Penulis akan mengkaji fenomena pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kebun Raya Gunung Tidar dengan turun langsung ke lokasi penelitian. Mutlak diperlukan pengelolaan yang optimal oleh masyarakat pada RTH Publik terbesar di Kota Magelang yaitu Kebun Raya Gunung Tidar. Hal ini karena selain menjadi ruang publik juga sebagai objek wisata. Oleh karena itu, fenomena ini perlu dikaji karena Kebun Raya Gunung Tidar sangat berdampak pada peningkatan pendapatan daerah serta mensejahterakan masyarakat sekitar.

2. Sumber dan Jenis Data

Data subjek dari mana data diperoleh dapat disebut sumber data. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Lofland dan Lofland dalam (Moleong, 2017) dalam penelitian kualitatif, sumber data utama sebagian besar melibatkan kata-kata dan tindakan, sementara itu terdapat data tambahan sebagai sumber informasi dari berbagai dokumen dan formulir. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan kedalam dua kategori yaitu data primer dan data skunder, seperti yang diuraikan dibawah ini:

a. Data Primer

Data primer mengacu pada jenis data yang didapatkan secara langsung dari sumber penelitian melalui banyak pendekatan metodologis, seperti wawancara terstruktur atau pengamatan secara sistematis. Dalam konteks penelitian ini, penulis dengan cermat mengumpulkan data primer melalui pelaksanaan wawancara bersama pengamatan secara *real-time* yang dilakukan di lingkungan ekologis Kebun Raya Gunung Tidar, yang terletak di Kota Magelang.

b. Data skunder

Data skunder didefinisikan sebagai informasi yang didapatkan secara tidak langsung oleh para peneliti untuk memperkuat dan memvalidasi temuan penelitian. Pada penelitian ini, penulis

menggunakan data sekunder yang bersumber dari berbagai bahan akademik, termasuk buku, jurnal ilmiah, tesis, dan disertasi yang dianggap relevan dan signifikan terkait topik penelitian yang akan dianalisis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Proses yang paling penting dalam penelitian adalah pengumpulan data. Dengan triangulasi data, peneliti dapat mengumpulkan data informasi serta fakta pendukung penelitian. Metode pengumpulan data ini meliputi:

a. Observasi

Metode pengumpulan data dengan observasi merupakan pengamatan terhadap objek yang diteliti secara langsung. Sebagaimana diungkapkan oleh Abdussamad (2021:147) observasi merupakan metodologi yang bertujuan untuk pengumpulan data yang memerlukan pengamatan cermat dan dokumentasi informasi terkait. Abdussamad (2021) menggambarkan terdapat tiga klasifikasi observasi yang berbeda yaitu observasi partisipatif dimana peneliti terlibat secara mendalam dalam kebiasaan subjek yang diteliti atau sebagai sumber data penelitian, observasi terstruktur yang berarti peneliti memberi tahu sumber data bahwa mereka sedang melakukan penelitian, dan observasi tak terstruktur didefinisikan oleh pengamatan sistematis yang tidak direncanakan tentang apa yang akan diamati. Observasi yang akan diterapkan peneliti adalah observasi partisipasi yang berarti peneliti akan mengamati aktivitas subjek penelitian langsung di lapangan dengan berpartisipasi kelompok yang akan diteliti, lalu mengambil keputusan terkait kegiatan yang dilakukan subjek penelitian dengan turut andil kedalam masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis akan terlibat secara langsung di Kawasan Kebun Raya Gunung Tidar yang terletak di Kota Magelang sebagai lokus pengamatan

penelitian dengan berpartisipasi aktif dan mengamati dalam RTH Publik di Kota Magelang.

b. Wawancara

Wawancara dapat didefinisikan sebagai teknik pengumpulan data guna mendapatkan suatu informasi dari orang yang akan diwawancarai, wawancara dilakukan melalui komunikasi lisan dua arah, baik langsung maupun tidak langsung. Menurut Sugiyono (2018), wawancara adalah metode pengumpulan data di mana dua individu dikumpulkan untuk melakukan aktivitas tanya jawab dengan tujuan untuk berbagi ide dan informasi dalam upaya untuk menghasilkan pemahaman tentang topik yang diteliti. Tujuan diadakannya wawancara supaya peneliti mendapatkan data dari perspektif orang, kejadian, motivasi, opini sehingga mudah dipahami melalui ekspresi yang didapatkan dari pihak yang diwawancarai. Penulis memilih metode wawancara mendalam (*in depth interview*) supaya hasil yang diperoleh detail dan rinci antar pewawancara dengan narasumber.

Pada penelitian ini, teknik wawancara yang dilakukan oleh penulis yaitu secara sistematis dan terstruktur, yang berarti menyusun terkait pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Teknik ini digunakan supaya pembicaraan antara narasumber dan pewawancara dapat terarah sesuai dengan pedoman wawancara yang sudah dibuat. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan metode wawancara secara mendalam didasarkan pada pedoman wawancara terstruktur yang digunakan untuk menanyakan pertanyaan kepada 10 informan, seperti Pengadministrasian pengelolaan, UPTD Kebun Raya Gunung Tidar, anggota komunitas pengelolaan di kelurahan magersari, masyarakat serta pengunjung RTH Kebun Raya Gunung Tidar. kelompok masyarakat dan seluruh instrumen yang berkaitan dalam kajian politik pengelolaan RTH Publik Kota Magelang. Informan nantinya

akan diberikan pertanyaan seputar pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik.

c. Dokumentasi

Peneliti menggunakan metode dokumentasi guna kebutuhan penelitian dengan mengumpulkan dokumen ataupun arsip yang dinilai penting. Ini memastikan bahwa data yang dikumpulkan kuat. Sehingga, dokumentasi bukan hanya bersumber dari foto namun dokumen atau arsip juga perlu dianalisa. Penulis mengumpulkan data dari RPJMD, DLH, DPUPR Kota Magelang yang berkorelasi dengan ruang terbuka hijau. Data yang diperoleh tersebut akan dianalisa yang akan menunjang atau memperkuat dari hasil penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dapat didefinisikan sebagai pendekatan sistematis untuk menafsirkan informasi yang diperoleh dari wawancara atau pengamatan lapangan. Data tersebut kemudian direduksi menjadi tema melalui proses peringkasan dan menyajikan data dalam tabel maupun pembahasan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kerangka analisis dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari komponen-komponen berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan memilih hal yang pokok, memfokuskan sesuatu hal yang penting atau bisa disebut dengan merangkum. Dalam analisis data, reduksi data ini merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan. Maka dari itu, reduksi memberikan gambaran dan mempertajam hasil pengamatan peneliti menjadi tema.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan menganalisis dalam bentuk label atau grafis. Tujuan dilakukan penyajian data, agar informasi yang diperoleh terorganisir atau tersusun sehingga mudah untuk

dimengerti. Dalam penelitian kualitatif, penyajian datanya berupa uraian secara singkat, tabel, serta bagan.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi menandakan puncak dari upaya penelitian kualitatif. Meskipun demikian, sesuai dengan kerangka analisis yang diusulkan oleh Miles dan Huberman, kesimpulan awal yang diartikulasikan bersifat tentatif dan dapat dimodifikasi jika bukti yang tidak memadai diidentifikasi untuk mendukung fase pengumpulan data berikutnya. Selanjutnya, proses memperoleh kesimpulan memerlukan ditinjau secara kritis untuk signifikansi atau kebenaran dalam konteks lingkungan penelitian.

Pada penelitian ini, penulis akan melakukan analisis data yaitu akan mencatat data primer maupun skunder dari informan yang diwawancara maupun bersumber dari jurnal. Kemudian, penulis akan mereduksi data serta menganalisis hasil yang diperoleh dengan menulis dalam bentuk teks naratif dari hasil yang ditemukan agar data yang didapatkan tersebut valid.

H. Sistematika Penulisan

Dalam kepenulisan skripsi, sistematika penulisan dapat didefinisikan sebagai rencana laporan penelitian yang ditulis secara naratif. Rangkaian dalam sistematika penulisan ini, terdapat rangkaian tiap bab dan sub-sub bab dalam penyusunan skripsi yang menunjukkan hubungan dengan sistematis. Sistem ini bertujuan agar skripsi yang disusun memiliki komposisi yang baik, rapi, dan benar. Sistematika penulisan ini berpedoman pada penyusunan skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang terdiri dari enam bab yaitu meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika dalam penulisan skripsi. Rangkaian diatas dapat menjabarkan terkait latar belakang

dari topik yang akan diteliti oleh penulis, yaitu Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan RTH Publik di Kebun Raya Gunung Tidar Kota Magelang. Lalu, penulis merumuskan menjadi dua masalah yang relevan dengan permasalahan yang terjadi. Adapun penulis memaparkan tujuan serta manfaat penelitian dari segi teoritis ataupun praktis. Kemudian, penulis melakukan tinjauan pustaka dari peneliti sarjana sebelumnya agar mendapatkan sudut pandang yang berbeda. Penulis juga melakukan analisa dengan menggunakan teknis dan metode penelitian.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab kedua penulis menjabarkan teori sesuai dengan objek penelitian, yaitu teori Cohen & Uphoff terkait partisipasi masyarakat. Penulis mengangkat teori Cohen & Uphoff serta sumber lainnya yang masih mempunyai korelasi dengan teori tersebut sebagai penunjang.

BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

Bab ketiga ini penulis akan menggambarkan kondisi yang akan diteliti yaitu Kebun Raya Gunung Tidar Kota Magelang sebagai objek penelitian. Penulis akan membahas terkait kondisi geografi, ekonomi, dan struktur lembaga politik. Selain itu, terdapat tokoh masyarakat sebagai informan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab keempat, akan menjelaskan atau menjawab rumusan masalah yang ada dalam bab pertama, pembahasan ini akan menjawab terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kebun Raya Gunung Tidar (KRGH) yang ada di Kota Magelang. Argumen dari kelompok masyarakat akan dianalisa atau dinarasikan secara deskriptif sebagai objek penelitian. Dalam

hal ini juga menjawab pertanyaan dari rumusan masalah kedua yaitu tantangan yang dihadapi masyarakat dalam pengelolaan RTH Publik Kebun Raya Gunung Tidar (KRG T) Kota Magelang. Data yang didapatkan dari narasumber maupun informan akan diulas kembali guna mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dan pola interaksi yang terjalin antar masyarakat dalam pengelolaan RTH Publik Kebun Raya Gunung Tidar. Kemudian, hasil dari pembahasan akan dikaji yang dikorelasikan dengan teori cohen dan uphoff.

BAB V ANALISA DATA

Pada bab kelima, akan melihat bagaimana pola interaksi dalam kolaborasi yang terjadi yang berisi analisa dari pembahasan bab keempat yang dikorelasikan dengan cohen dan uphoff.

BAB VI PENUTUP

Bab terakhir ini akan membahas terkait kesimpulan, saran, maupun rekomendasi. Kesimpulan merupakan jawaban teoritis atau empiris yang memuat inti dari penelitian. Sedangkan saran serta rekomendasi merupakan tindak lanjut dari hasil penelitian yang digunakan untuk kebijakan atau penelitian lanjutan. Hal ini memberikan pandangan atau masukan penulis kepada berbagai pihak masyarakat dan pemerintah. Penulis mengambil kesimpulan dari kajian terkait Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan RTH Publik di Kebun Raya Gunung Tidar Kota Magelang. Sedangkan dalam saran, penulis akan memberikan pandangan pada Pemerintah Kota Magelang dan masyarakat tentang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik, Kebun Raya Gunung Tidar di Kota Magelang.

BAB II

KERANGKA TEORI

Pada bab kedua, penulis memaparkan kerangka teori yang nantinya akan digunakan oleh penulis dalam membantu menganalisis jawaban atas penelitian yang dilakukan. Adapun teori yang digunakan adalah teori Cohen dan Uphoff (1980) tentang partisipasi masyarakat. Konsep partisipasi masyarakat merupakan proses dimana keputusan pemerintah yang diambil perlu melalui proses kepentingan, kebutuhan dan nilai publik. Adanya proses ini supaya keputusan yang dihasilkan lebih baik dengan adanya komunikasi secara dua arah yang didukung oleh publik.

A. Definisi Konseptual

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi berasal dari kata *participate* yang berarti mengambil bagian dalam suatu kegiatan atau membagi sesuatu dalam kebersamaan. Lebih dari itu, partisipasi dapat diartikan juga sebagai keterlibatan atau kolaborasi nyata dalam suatu rancangan program. Partisipasi merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan masyarakat yang melibatkan warga masyarakat sebagai subjek aktif dalam prosesnya (Budi & Akbar, 2018). Sedangkan posisi masyarakat dalam partisipasi tidak terbatas. Masyarakat perlu dilibatkan dalam seluruh aspek mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan hingga evaluasi atau rancangan program pemerintah. Hal ini berarti partisipasi masyarakat terjadi apabila masyarakat sebagai pihak yang terdampak harus benar-benar diberi ruang untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan mengenai program yang ditujukan bagi masyarakat supaya hasil keputusan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat.

Peran dalam kegiatan partisipasi masyarakat, mereka harus memiliki eksistensi. Hal ini dikarenakan masyarakat memiliki andil untuk memperoleh output yang terbaik yang memandakan pemerintah memberikan ruang kepercayaan untuk ikut merasa akan tanggung jawabnya terhadap program yang sedang direncanakan. Partisipasi dianggap penting untuk perencanaan dan implementasi pembangunan yang sukses, yang membutuhkan kesadaran dan

kemauan masyarakat untuk berkontribusi. Pendekatan partisipatif, seperti Musrenbang, memfasilitasi negosiasi dan pembangunan konsensus antara pemangku kepentingan pemerintah dan non-pemerintah (Nurhidayah, 2020). Partisipasi masyarakat juga menjadi komponen penting dalam pembangunan berkelanjutan dan proses pengambilan keputusan politik (Issa et al., 2024); (Maya et al., 2024). Untuk meningkatkan partisipasi, diperlukan kemauan politik pemerintah untuk membuka ruang bagi masyarakat berpartisipasi. Dengan melibatkan publik dalam proses tersebut, kebijakan yang dikembangkan menunjukkan peningkatan kualitas dan memfasilitasi pencapaian tujuan yang dimaksudkan. Partisipasi dalam perumusan kebijakan daerah juga dapat disebut sebagai partisipasi politik. Dari definisi yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan kolektif yang memiliki pemahaman tentang kerangka kerja sosial ekonomi dalam konteks perencanaan pembangunan, yang dibentuk oleh banyak faktor penentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengetahuan, keahlian, dan elemen infrastruktur.

2. Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu unsur penting dalam perencanaan kota, yang didefinisikan sebagai ruang terbuka yang ditumbuhi vegetasi dan memiliki berbagai fungsi di dalam kota yang memainkan peran penting dalam perencanaan perkotaan dan kualitas lingkungan. Ruang Terbuka Hijau berdasarkan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang, jalur atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau (RTH) menurut beberapa tokoh merupakan salah satu elemen esensial ruang perkotaan yang memberikan manfaat ekologis, edukatif, dan ekonomi (Fitrian, 2019). RTH didefinisikan sebagai kawasan terbuka di dalam kota, meliputi koridor, zona, dan kawasan, yang dicirikan oleh komponen hijau (Nugroho, 2015). Perencanaan RTH sangat penting untuk kenyamanan hunian, dengan penduduk di permukiman formal dan informal menyatakan keinginan untuk menghijaukan lingkungan mereka.

Kehadiran Ruang Terbuka Hijau (RTH) di daerah perkotaan mengharuskan adanya alokasi minimum 30% dari total luas lahan perkotaan. Minimum yang ditetapkan ini berfungsi sebagai tolak ukur kuantitatif untuk menilai ekosistem perkotaan, menekankan pentingnya menyelaraskan ruang rekreasi dengan area terbuka hijau untuk menumbuhkan lingkungan hidup yang kondusif. Perencanaan strategis RTH dalam konteks perkotaan diantisipasi untuk menghasilkan hasil yang menguntungkan dan efek menguntungkan bagi penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Secara khusus, proporsi RTH 30% yang diamanatkan terdiri dari 20% yang ditujukan untuk RTH Publik dan 10% dialokasikan untuk RTH Privat.

Ruang Terbuka Hijau Publik adalah kawasan yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum. Ruang-ruang ini memiliki banyak fungsi, termasuk perlindungan lingkungan, interaksi sosial, dan pengembangan ekonomi (Fitriyah & Purwanto, 2020). Peraturan Indonesia mengamanatkan bahwa kota-kota mengalokasikan minimal 20% dari wilayah mereka untuk ruang terbuka hijau publik (Jabbarudin & Hasjad, 2022). Ruang-ruang ini dapat mengambil berbagai bentuk, seperti taman kota, hutan kota, dan tempat rekreasi. Penyediaan ruang terbuka hijau didasarkan pada tiga aspek yaitu luas lahan, jumlah penduduk, dan kebutuhan fungsional tertentu (Sahalessy et al., 2022). Sedangkan Ruang Terbuka Hijau Privat adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh individu atau badan hukum yang pemanfaatannya terbatas untuk kalangan tertentu, seperti kebun atau halaman rumah atau gedung milik masyarakat atau swasta yang ditanami tumbuhan. RTH Privat meliputi pekarangan rumah, halaman perkantoran, pertokoan, pendidikan, kesehatan dan tempat usaha, taman atap bangunan, dan taman RT, RW, Kelurahan, serta Kecamatan.

Figure 1 RTH Publik, Kebun Raya Gunung Tidar Kota Magelang



Sumber : Dokumentasi, penulis

Figure 2 RTH Privat, Halaman Rumah



Sumber: Dokumentasi, penulis

Eksistensi Ruang Terbuka Hijau dalam sebuah kota mempunyai fungsi dalam perencanaannya, yang meliputi :

a. Fungsi Ekologi

Fungsi ekologis dalam Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan perkotaan. RTH berkontribusi pada peningkatan kualitas udara tanah, pencegahan banjir, pengurangan polusi udara, dan pengaturan iklim mikro (Ernawati, 2025). Fungsi ekologi pohon di RTH meliputi peneduh (modifikasi suhu), kontrol kelembaban udara, dan penahan angin (Novyandy, 2019).

b. Fungsi Estetis

Fungsi estetika pada ruang terbuka hijau (RTH) memegang peranan penting dalam lingkungan perkotaan. RTH memberikan daya tarik visual dan kenyamanan bagi penggunaannya dengan penataan ruang yang menarik dan harmonis (Nurjannah Hamdani, Cici Nurfatimah, 2020). Selain itu, Ruang Terbuka Hijau memiliki fungsi dapat mengurangi stres dan depresi akibat kepadatan dan kekacauan perkotaan (Mashar, 2021). Pertimbangan estetika sangat penting dalam desain, karena bentuk yang menarik dapat meningkatkan minat dan potensi penggunaan suatu ruang.

c. Fungsi Ekonomis

Fungsi ekonomi ruang terbuka hijau perkotaan, termasuk hutan perkotaan, dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Hutan perkotaan dapat menampung kegiatan ekonomi bernilai tinggi dengan tetap menjaga perannya sebagai ruang terbuka hijau, sehingga berpotensi meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan kawasan tersebut. (M. R. Setiawan et al., 2023).

d. Fungsi Sosial

Kehadiran ruang terbuka yang hijau dapat berfungsi sebagai area sosial, yaitu tempat interaksi sosial antar warga, termasuk fasilitas seperti taman bermain untuk anak-anak, tempat berteduh, tempat untuk berolahraga, serta beragam kegiatan organisasi untuk masyarakat. Selain itu, ruang-ruang ini dapat

berfungsi sebagai sumber daya untuk tujuan pendidikan atau penelitian ilmiah dalam penyelidikan fenomena alam.

B. Kerangka Teori Partisipasi Masyarakat Cohen dan Uphoff 1980

Pada dasarnya, menurut Cohen dan Uphoff 1980 partisipasi merupakan istilah deskriptif yang mencakup berbagai kegiatan dengan situasi yang berbeda dan bukan sesuatu yang ada atau tidak ada yang dapat diukur dengan cara yang sama. Pada dimensi partisipasi ini menggambarkan terkait tiga kerangka kerja yang dapat menjadi suatu pertanyaan tentang jenis partisipasi apa yang terjadi atau tidak terjadi, siapa yang berpartisipasi dan bagaimana proses dari adanya partisipasi tersebut.

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan (*Participation in decision making*)

Partisipasi ini dapat dirumuskan dengan mengkategorikan menjadi 3 bagian yaitu *keputusan awal*, dimana pada tahap awal ini dapat memberikan informasi penting tentang apakah program harus dimulai, dimana, dan kontribusi yang diharapkan. Oleh karena itu, pada keputusan awal dapat memberikan informasi penting dalam mencegah kesalahpahaman dari masalah maupun keputusan strategi. Di keputusan awal ini, masyarakat harus dilibatkan dari segi lokasi, anggaran, serta kontribusi. Dengan demikian, masyarakat setempat harus dilibatkan pada keputusan awal agar menghindari hal yang tidak diharapkan untuk pelaksanaan program.

Bagian kedua *keputusan yang sedang berlangsung* yang berarti beberapa masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam keputusan awal agar mengikuti keputusan yang sedang berlangsung, karena partisipasi ini mungkin lebih penting dari keputusan awal. Pengambilan keputusan berjalan terdiri dari aktivitas merespons kebutuhan dan prioritas baru yang terkait dengan program/kegiatan. Pengambilan keputusan juga merupakan proses dari pemecahan masalah dengan menentukan pilihan dari beberapa alternatif untuk menetapkan tindakan di program kedepannya.

Bagian ketiga adalah *keputusan operasional* yang berkaitan dengan organisasi atau badan yang dibuat dalam sebuah program. Pengambilan

keputusan operasional memiliki signifikansi yang lebih besar sebagai konsekuensi dari pembentukan program atau organisasi yang terkait dengan program, yang bertujuan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program tersebut. Partisipasi dalam hal ini mengarah kepada partisipasi berkenaan dengan prosedur rapat, pemilihan pemimpin. Oleh karena itu, partisipasi ini bukan hanya sebatas formalitas saja.

2. Partisipasi dalam implementasi (*Participation in implementation*)

Pada aspek ini, masyarakat terlibat dalam pelaksanaan pembangunan. Masyarakat berpartisipasi pada implementasi dapat *berkontribusi sumber daya*, seperti tenaga, material atau informasi. Masyarakat dapat berkontribusi berupa tenaga yang mengabdikan kemampuan dari segi fisik, seperti gotong royong pembangunan jalan, fasilitas umum, dll. Selain itu, masyarakat dapat berkontribusi berupa uang. Apabila masyarakat terkendala untuk ikut dalam proses pembangunan dapat memilih berkontribusi dalam memberikan bantuan uang untuk menunjang proses pembangunan. Bentuk kontribusi ini juga dinilai sangat membantu dalam pembangunan. Namun, kontribusi ini juga menyesuaikan dengan kemampuan masyarakat itu sendiri. Kontribusi dapat berupa bahan material yang digunakan untuk proses pembangunan. Partisipasi ini harus diketahui dengan jelas siapa yang berkontribusi, bagaimana kontribusinya, dan apakah kontribusi yang diberikan bersifat paksaan, sukarela dan apakah kontribusi ini terjadi berulang kali atau hanya secara berkala. Kontribusi ini harus dipastikan agar sumber daya yang tidak merata atau eksploitatif tidak terjadi.

Partisipasi dapat melalui *administrasi atau koordinasi* terkait program dimana masyarakat terlibat dalam pelaksanaannya, baik berperan sebagai karyawan maupun sukarela. Dengan melibatkan masyarakat setempat dalam koordinasi, hal ini akan menjadikan masyarakat. Selain itu, masyarakat dapat memperoleh informasi dan saran terkait program yang dapat memberikan dampak terkait program yang sedang berlangsung.

Partisipasi yang paling umum adalah dengan pendaftaran terkait program yang berlangsung. Tahap ini lebih banyak konsekuensi yang diperoleh atau

dapat disebut partisipasi dalam konsekuensi yang dapat merugikan karena pendaftaran tidak selalu mendapatkan manfaat.

3. Partisipasi dalam manfaat (*Participation in benefits*)

Dalam sebuah program yang berjalan, pasti akan menghasilkan manfaat baik dari segi material, sosial, dan pribadi. Partisipasi dalam manfaat juga pasti memiliki konsekuensi. Terkait siapa yang berpartisipasi, mengapa, hingga solusi dalam program yang berlangsung. Dari segi material, pada dasarnya adalah barang milik individu. Manfaat material bukan hanya dari segi uang saja, namun dapat berupa berbagai hal yang berwujud nyata. Namun, penting mengetahui terkait siapa dan bagaimana proses terjadinya dalam manfaat material ini.

Manfaat sosial merupakan hal yang menjadi milik bersama. Manfaat sosial mengacu pada hal yang timbul dari keterlibatan masyarakat dan inisiatif sosial. Dalam hal ini, manfaat yang didapatkan dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat. Bentuk dari manfaat sosial ini seperti fasilitas atau kualitas layanan yang layak untuk masyarakat. Hal ini supaya masyarakat lebih terpadu untuk meningkatkan kualitas hidup.

Manfaat personal merupakan manfaat yang berbeda dari manfaat sosial dan manfaat material. Hal ini bukan berarti bahwa hal tersebut harus terjadi secara individu. Manfaat bagi setiap individu juga sangat diperlukan, walaupun seringkali tidak diperoleh secara individu. Pengambilan manfaat personal lebih mengacu kepada keuntungan pribadi yang dirasakan oleh beberapa orang. Adanya kemungkinan manfaat yang dihasilkan dari harga diri, kekuatan politik atau rasa keberhasilan juga menjadi manfaat yang dihasilkan dalam sebuah program.

4. Evaluasi (*Evaluation*)

Partisipasi pada aspek evaluasi menurut Cohen & Uphoff (1980) dapat terjadi melalui proses langsung maupun tidak langsung. Apabila terjadi peninjauan formal, maka evaluasi akan dilakukan dengan siapa yang berpartisipasi didalam program, bagaimana kelanjutannya, dan faktor apa yang menjadi kekuatan berdasarkan evaluasi. Hal ini juga berlaku apabila terjadi

peninjauan informal dalam partisipasi masyarakat. Evaluasi program juga terjadi melalui aktivitas politik. Apabila dalam rancangan program diatur secara khusus masyarakat hanya akan melakukan konsultasi informal. Kecuali program tidak memberikan fasilitas kegiatan evaluasi dalam design awal program, maka tidak akan terjadi evaluasi yang melibatkan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan teori partisipasi masyarakat Cohen dan Uphoff (1980), dapat dipahami bahwa empat partisipasi di atas dapat menjelaskan mengenai bagaimana dan sejauh apa peran yang diambil untuk turut terlibat pada sebuah program. Keempat jenis tahapan partisipasi ini jika dilakukan bersama akan membentuk semacam siklus kegiatan pembangunan dengan memusatkan perhatian serta cara-cara partisipasi sehingga dapat menjelaskan dan mengindikasikan kualitas partisipasi. Selain itu, partisipasi juga harus memperhatikan terkait siapa saja yang berpartisipasi. Pihak yang berpartisipasi *pertama*, penduduk lokal yang memiliki akar lokal atau heterogen. Penduduk lokal mencakup kelompok besar dalam program. *Kedua*, Pemimpin lokal menjadi sasaran program, karena memiliki keterlibatan jangka panjang yang bekerja dalam wilayah tersebut. Orang-orang ini biasa disebut sebagai elit lokal. Namun, pemimpin lokal berbeda di setiap wilayah seperti pemimpin informal atau tokoh masyarakat setempat, kepala asosiasi, dan pemegang jabatan lokal seperti kepala desa atau walikota. *Ketiga*, Personel pemerintah biasanya ditugaskan dalam jangka waktu tertentu. Mereka biasanya memiliki status sosial yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat setempat. Walaupun mereka penduduk setempat pun birokrasi tetap pada pusat. Penting untuk dapat mengetahui peran yang mereka tawarkan atau bahkan mengalangi program yang sedang berlangsung. *Keempat*, Personel asing sering kali dianggap tidak penting, namun tak jarang mereka juga ikut berpartisipasi dalam suatu program yang memiliki partisipatif cukup penting seperti swasta.

Penting untuk memfokuskan pihak yang memicu partisipasi. Apakah inisiatif program ini dari masyarakat itu sendiri, pemimpin lokal, pejabat

nasional atau personal asing. Pada dasarnya partisipasi dapat dinilai dari dimensi siapa dan apa. Namun, tidak dipungkiri bahwasannya inisiatif berpartisipasi ini berasal dari kalangan atas atau bawah, dorongan dalam berpartisipasi koersif atau sukarela, formal atau informal, dan partisipasi ini bersifat selamanya atau berjangka. Hal ini dapat menjadi pertimbangan terkait kapasitas yang dimiliki untuk mendapatkan hasil dari keterlibatan pengambilan keputusan dan implementasi. Proses adanya partisipasi juga dapat dinilai dari seseorang melakukan partisipasi tersebut secara langsung yang memiliki dampak lebih besar namun sulit dicapai atau diwakilkan oleh orang lain. Proses diwakilkan ini dapat terjadi dari partisipasi dalam pengambilan keputusan, manfaat dan implementasi.

Pada dasarnya tujuan dari partisipasi ini adalah normatif karena adanya perbedaan pendapat. Dalam hal partisipasi masyarakat, penting untuk mengetahui tujuan dari adanya partisipasi itu sendiri. Hal yang dapat menjadi pertimbangan adalah apakah pihak yang berwenang untuk mengajak berpartisipasi sama atau sesuai dengan tujuan masyarakat atau mereka sendiri. Apabila pemerintah menginginkan sesuatu dari atau untuk masyarakat yang tidak diinginkan oleh masyarakat itu sendiri, maka sudah jelas kalau hal ini ambigu dan dipastikan akan mempengaruhi terjadinya partisipasi yang mendorong partisipasi kritis dari publik. Partisipasi yang menjadi pertanyaan valid untuk dipertimbangkan adalah siapa yang seharusnya mendapatkan partisipasi, karena partisipasi masyarakat sebagian besar sebagai instrumen untuk dominasi birokrasi dalam proses modernisasi.

Penting untuk menilai terkait jenis partisipasi serta dampaknya karena terdapat beberapa jenis partisipasi yang memungkinkan dan tidak semuanya sama-sama diinginkan. Perlu adanya analisis untuk mengidentifikasi siapa yang berpartisipasi dalam implementasi pengambilan keputusan dan siapa yang berpartisipasi dalam pengambilan dan evaluasi dengan jelas untuk menjelaskan partisipasi untuk siapa dan untuk apa. Konteks dalam lingkungan partisipasi juga harus dipertimbangkan karena akan mempengaruhi perencanaan dan penilaian partisipasi, dari latar maupun tujuannya dari adanya partisipasi.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan masyarakat terjadi ketika individu mengalami rasa pemberdayaan dan motivasi untuk mengambil bagian dalam proses pemerintahan dan pengambilan keputusan yang memiliki dampak langsung pada kehidupan mereka. Keterlibatan ini sering difasilitasi oleh lingkungan yang kondusif, kerangka kerja legislatif, dan inisiatif yang lebih tinggi ketika mereka menganggap kontribusi mereka sebagai konsekuensial (Yuswarni & Riyanda, 2023). Selain itu, kurangnya minat dalam urusan kota ditambah dengan hambatan birokrasi, ketergantungan pada bantuan pemerintah dan kurangnya pemahaman tentang struktur pemerintahan lokal juga dapat membatasi keterlibatan masyarakat. Sementara partisipasi masyarakat sangat penting untuk kemandirian pemerintahan, sangat penting untuk mengakui bahwa tidak semua komunitas terlibat pada tingkat yang sama. Faktor-faktor seperti status sosial ekonomi, pencapaian pendidikan, dan konteks historis dapat memberikan pengaruh besar pada tingkat partisipasi.

Partisipasi masyarakat merupakan konsep yang memiliki banyak sisi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam berbagai konteks. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat meliputi sosialisasi program, metode penyampaian informasi, ketersediaan dana, waktu pelaksanaan, kesadaran masyarakat, serta sarana dan prasarana. Untuk meningkatkan partisipasi, diperlukan upaya advokasi dan pelibatan masyarakat yang lebih luas dalam seluruh tahapan program (Putri Siregar et al., 2021). Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat dikategorikan menjadi elemen eksternal dan internal. Memahami faktor-faktor ini sangat penting untuk mendorong keterlibatan masyarakat dan meningkatkan modal sosial. Bagian berikut menguraikan pengaruh utama pada partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan meliputi:

1. Faktor Eksternal

Karakteristik lingkungan sosial, termasuk pendapatan dan tingkat pendidikan, berdampak signifikan terhadap partisipasi. Misalnya, tingkat

pendidikan yang lebih tinggi berkorelasi dengan peningkatan keterlibatan dalam kegiatan sosial (Kharisma, 2018)

2. Inisiatif Masyarakat: Kehadiran organisasi dan upaya pemerintah untuk merangsang partisipasi dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat. Jangkauan aktif dan dukungan dari pemerintah daerah sangat penting untuk mendorong keterlibatan (Vorobeve & Guzhavina, 2022).

3. Faktor Internal

Motivasi dan Nilai: Motivasi pribadi, seperti keinginan untuk koneksi sosial dan ikatan masyarakat, mendorong individu untuk berpartisipasi. Partisipasi informal sering kali menghasilkan modal sosial yang lebih besar karena sifat hubungan yang terbentuk (Vorobeve & Guzhavina, 2022).

4. Pengaruh Demografis: Usia, jenis kelamin, dan status kesehatan juga memainkan peran penting. Orang dewasa yang lebih tua, misalnya, mungkin menghadapi hambatan karena norma sosial dan keterbatasan fisik, yang memengaruhi tingkat keterlibatan mereka.

Meskipun faktor sosial ekonomi sering dianggap penting, kesadaran individu dan motivasi pribadi terkadang dapat lebih besar daripada pengaruh ini, yang menunjukkan interaksi yang kompleks antara berbagai faktor penentu partisipasi sosial (Fathma et al., 2024). Penting untuk menyadari bahwa pengaruhnya dapat bervariasi tergantung pada konteks dan dinamika masyarakat tertentu. Misalnya, dalam beberapa kasus, manfaat yang diterima oleh masyarakat dapat secara signifikan meningkatkan partisipasi, sementara dalam kasus lain kepemimpinan dan komunikasi mungkin lebih penting. Memahami nuansa ini sangat penting untuk secara efektif memanfaatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai inisiatif.

BAB III

POTRAIT OBJEK PENELITIAN KOTA MAGELANG

Pada bab ini, penulis akan memaparkan gambaran terkait objek penelitian Ruang Terbuka Hijau Publik di Kebun Raya Gunung Tidar Kota Magelang. Penulis akan menjelaskan tentang potrait Kota Magelang yang meliputi kondisi geografis, topografis, demografis, kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi politik, kondisi lingkungan, landscape RTH Publik Kebun Raya Gunung Tidar yang terletak di Kota Magelang serta fungsi dan manfaat RTH Publik yang diperoleh dari penelusuran data primer maupun data skunder. Terkait rinciannya dari Potrait Kota Magelang dan Kawasan Kebun Raya Gunung Tidar yaitu sebagai berikut :

A. Kondisi Geografis

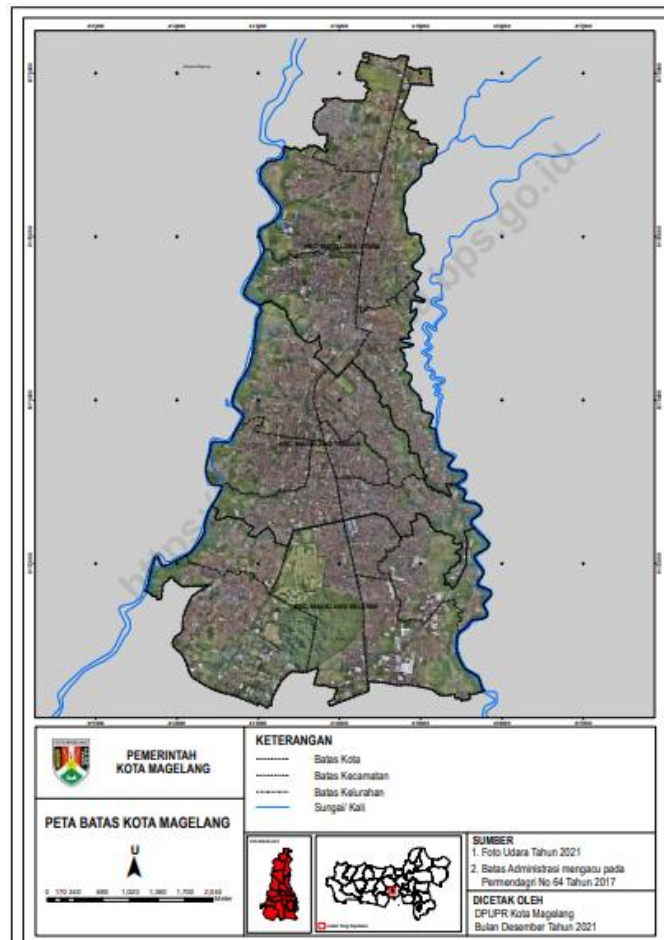
Kota Magelang merupakan daerah yang sangat strategis, karena terletak di tengah-tengah Provinsi Jawa Tengah. Letak geografis Kota Magelang yang menguntungkan semakin diperkuat oleh klasifikasinya sebagai Pusat Kegiatan Daerah (PKW) di Kawasan Purwomanggung, yang meliputi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kota Magelang, dan Kabupaten Magelang sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang Nasional dan Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah. Kota ini kaya akan daya tarik alam dan budaya karena dikelilingi oleh tujuh gunung yang menciptakan bentang alam unik dalam perkembangan historisnya. Potensi pariwisata Kota Magelang menjadi strategi untuk membangun city branding Kota Sejuta Bunga. Tantangan dalam pengembangan pariwisata tetap ada, namun Kota Magelang tetap berfokus dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Secara geografis Kota Magelang terletak pada 110o12'30" - 110o12'52" Bujur Timur dan 7o26'28" - 7o30'9" Lintang Selatan serta pada ketinggian 354,17 meter diatas permukaan laut. Kota ini terletak pada posisi strategis, karena berada tepat di tengah-tengah Pulau Jawa. Secara astronomis didukung dengan batas-batas wilayah meliputi :

1. Sebelah Utara ialah Kecamatan Secang, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang

2. Sebelah Timur ialah Sungai Elo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang
3. Sebelah Selatan ialah Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang
4. Sebelah Barat ialah Sungai Progo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang.

Figure 3 Peta Wilayah Kota Magelang



Sumber : BPS Kota Magelang

Menurut Badan Pusat Statistik, letak astronomis dan perbatasan wilayah, Kota Magelang memiliki luas wilayah 18,56 km² atau sekitar 0,06% dari keseluruhan luas wilayah Provinsi Jawa Tengah yang terbagi menjadi :

Tabel 1 Luas Wilayah Per Kecamatan di Kota Magelang

No	Kecamatan	Luas Area (km²)	Presentase Terhadap Luas Kota
1.	Magelang Utara	6,29	33,88
2.	Magelang Tengah	5,13	27,65
3.	Magelang Selatan	7,14	38,47
4.	Kota Magelang	18,54	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Magelang 2024, diolah oleh penulis

B. Kondisi Topografis

Kota Magelang merupakan dataran tinggi yang berada di ketinggian kurang dari 380 meter di atas permukaan laut. Kota ini memiliki kemiringan berkisar antara 5o - 45o. Kota Magelang dikelilingi oleh gunung-gunung dan pegunungan, seperti Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Pegunungan Menoreh, Pegunungan Telomoyo, Pegunungan Gianti, dan Pegunungan Andong. Wilayah perkotaan Magelang dicirikan oleh konfigurasi geografis yang sebagian besar diklasifikasikan sebagai dataran rendah, secara khusus dikategorikan sebagai dataran aluvial yang menunjukkan lereng bervariasi, terletak pada ketinggian mulai dari 375 hingga 500 meter di atas permukaan laut, dengan puncaknya adalah Gunung Tidar pada ketinggian 503 meter di atas permukaan laut. Kehadiran Gunung Tidar merupakan jantung kota sebagai kawasan lindung yang merupakan ciri khas (landmark) Kota Magelang, karakteristik yang tidak umum ditemukan di banyak daerah lain. Selain berfungsi sebagai zona ekologi yang dilindungi dengan gradien 30-40%, Gunung Tidar, yang saat ini ditetapkan sebagai Kebun Raya, juga bertindak sebagai ruang hijau vital yang berkontribusi terhadap iklim sedang Kota Magelang.

No.	Kemiringan Lereng	Luas (Ha)	Presentase
1.	2-15%	1.164,671674	62,79
2.	15-25%	421,3464476	22,72
3.	25-40%	237,8845045	12,83
4.	Lebih 40%	30.77723945	1,66

Total	1.854,679865	100,00
--------------	---------------------	---------------

Sumber : RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026

Kota Magelang memiliki sudut kemiringan yang bervariasi, kemiringan topografi yang ada di bagian barat (sepanjang sungai progo) dan sebelah timur (sungai elo) dengan kemiringan 15-25%. Sedangkan mayoritas masyarakat Kota Magelang yang berada dalam kemiringan 2-15% dengan luas 62,79% dari seluruh luas wilayah Kota Magelang. Wilayah dengan kemiringan 2-15% yang berada di sebelah timur kompleks Akmil ke utara hingga daerah RSJ Magelang memiliki medan yang sedang dan landai.

Konfigurasi fisik Kota Magelang saat ini menunjukkan kondisi fisik yang berbeda sesuai dengan infrastruktur jalan arteri. Mengingat karakteristik spasial ini, kecenderungan pertumbuhan alami Kota Magelang diarahkan ke wilayah utara dan selatan, dengan konsentrasi zona maju yang menonjol di daerah yang ditandai dengan topografi yang relatif datar. Mengingat topografi ini, zona perumahan sebagian besar terletak di daerah dengan ketinggian minimal. Namun, karena keterbatasan lahan yang tersedia, perluasan pemukiman juga melanggar wilayah dengan variasi topografi yang tajam.

C. Kondisi Demografis

Menurut data dari Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang pada tahun 2024 menunjukkan total populasi sekitar 128.709 jiwa yang terdiri dari 63.612 laki-laki dan 65.097 perempuan, sehingga mencerminkan distribusi gender yang relatif seimbang dalam populasi perkotaan. Sebagai perbandingan dengan angka demografis yang tercatat pada tahun 2023 sebelumnya, perlu dicatat bahwa Kota Magelang telah mengalami peningkatan populasi yang sederhana namun signifikan yaitu total populasi sekitar 128.264 terdiri dari 63.345 laki-laki dan 64.919 perempuan yang mungkin menunjukkan berbagai faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ini.

Tabel 2 Statistik Kependudukan Kota Magelang 2022-2024

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Kepadatan Penduduk
--------------	------------------	------------------	---------------	---------------------------

				(Jiwa/Km ²)
2022	63.162	64.803	127.965	6.895
2023	63.345	64.919	128.264	6.911
2024	63.612	65.097	128.709	6.935

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang 2024 , diolah oleh penulis

Selain itu, kepadatan penduduk Kota Magelang menurut Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang pada tahun 2024 diproyeksikan mencapai 6.935 jiwa/km². Apabila menganalisis kontribusi berbagai kecamatan terhadap keseluruhan populasi Kota Magelang, menjadi jelas bahwa Kecamatan Magelang Tengah menyumbang proporsi penduduk terbesar, menyumbang kepadatan luar biasa 9.506 jiwa/km², sehingga menggarisbawahi statusnya sebagai pusat kota padat penduduknya. Sebaliknya, kecamatan yang ditandai dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Magelang Utara, di mana kepadatannya tercatat 5.983 individu /km², menunjukkan lingkungan yang lebih luas dan berpotensi kurang urban. Sedangkan Kabupaten Magelang Selatan, masih menyumbang 5.926 individu /km² untuk lanskap demografis kota, sehingga menggambarkan distribusi penduduk yang relatif merata di berbagai Kecamatan.

D. Kondisi Ekonomi

Kondisi Perekonomian di Kota Magelang dapat dianalisis dari beragamnya mata pencaharian penduduk Kota Magelang yang dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 3 Persebaran Demografi Kota Magelang berdasarkan Mata Pencaharian Penduduk Tahun 2023-2024

No.	Mata Pencaharian	2023	2024
1.	Tidak/Belum Bekerja	19.540	19.777
2.	Mengurus Rumah Tangga	19.684	19.698
3.	Pensiunan	3.028	3.003
4.	PNS/TNI/Polri	4.874	4.860

5.	Dokter/Bidan/Perawat	564	594
6.	Pedagang	1.858	1.833
7.	Wiraswasta	11.843	11.877
8.	Karyawan Swasta	26.266	26.305
9.	Buruh Tani/Perkebunan	58	53
10.	Lainnya	9.177	9.219

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kota Magelang, diolah oleh penulis

Berdasarkan dari tabel diatas, mata pencaharian tertinggi Kota Magelang tahun 2023-2024 adalah sebagai karyawan swasta. Sedangkan mata pencaharian penduduk dengan jumlah terendah adalah sebagai buruh tani/perkebunan. Dari kondisi berbagai keberagaman mata pencaharian penduduk Kota Magelang juga mendorong adanya Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari Ekonomi Kota Magelang triwulan III-2024 menurut Badan Pusat Statistik Kota Magelang terhadap periode yang sama di tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,17%. Dari sisi produksi atau lapangan usaha, sektor tersier mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,10% yang diikuti oleh sektor sekunder dan primer, masing-masing sebesar 3,32 dan 1,29%.

Kondisi kemiskinan juga dapat dilihat dari jumlah penduduk miskin Kota Magelang pada Maret 2024 tercatat sebanyak 7.250 orang. Dibandingkan dengan Maret 2023, terjadi pengurangan 200 individu dalam demografi miskin. Selama tiga tahun terakhir, Kota Magelang telah menyaksikan penurunan tingkat kemiskinan relatif terhadap keadaan sebelum pandemi Covid-19. Proporsi populasi miskin pada Maret 2024 dikuantifikasi sebesar 5.94 persen, mencerminkan penurunan 0.17 poin persentase jika disandingkan dengan Maret 2023. Berbeda dengan kabupaten lain di Jawa Tengah, Kota Magelang menempati urutan ketiga dalam hal persentase penduduk miskin terendah, menyusul Kota Semarang dan Kota Salatiga, yang masing-masing melaporkan 4,03 persen dan 4,57 persen individu miskin pada Maret 2024. Kondisi ini tetap konsisten dengan

yang diamati pada tahun 2023. Mengenai jumlah absolut penduduk miskin, Kota Magelang menunjukkan populasi individu miskin terkecil di Jawa Tengah, relatif terhadap total populasi penduduknya.

Tabel 4 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Magelang 2022-2024

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Presentase Penduduk Miskin (persen)
Maret 2022	8,65	7,10
Maret 2023	7,45	6,11
Maret 2024	7,25	5,94

Sumber : BPS Kota Magelang, diolah oleh penulis

E. Kondisi Sosial

Pada aspek ini, pembangunan sosial dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui penerapan kebijakan yang membahas dimensi sosial, serta aspek lain seperti fasilitasi kehidupan beragama. Tujuan pembangunan sosial secara khusus berorientasi pada pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam sektor sosial, yang meliputi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) merupakan komponen vital masyarakat yang menawarkan bantuan substansial dalam memenuhi kebutuhan PMKS dalam masyarakat setempat. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) berfungsi untuk meningkatkan dan meningkatkan kerangka inisiatif kesejahteraan sosial. Pengelolaan masalah sosial di Kota Magelang merupakan perlu adanya perhatian yang signifikan karena dari tiga tahun terakhir, menurut sumber dari Dinas Sosial Kota Magelang jumlah PMKS pada tahun 2022 mencapai 6.813 jiwa, hal ini meningkat dari tahun 2023 sebesar 6.053 jiwa. Populasi PMKS semakin menurun hingga tahun 2024 yang mencapai 5.773 jiwa.

Peningkatan kohesi sosial dan benteng identitas budaya lokal merupakan perhatian penting bagi Kota Magelang dalam upayanya menumbuhkan lingkungan yang tidak hanya nyaman tetapi juga kondusif bagi kehidupan perumahan. Kohesi sosial tidak semata-mata dibangun melalui interaksi antar

komunitas di tingkat makro tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan interpersonal di tingkat mikro, dimulai dengan unit sosial fundamental, yaitu keluarga. Pentingnya kohesi sosial digarisbawahi oleh kapasitasnya untuk menumbuhkan rasa aman dan mempromosikan proliferasi toleransi dalam masyarakat. Selain itu, mengingat kemajuan pesat dalam teknologi, paradigma dan perspektif budaya yang beragam semakin meresap ke dalam struktur keberadaan masyarakat. Fenomena ini memerlukan penekanan bersamaan pada pemahaman nilai-nilai moral dan spiritual, sehingga memastikan bahwa karakter budaya Jawa khususnya, tetap tidak terganggu oleh laju kemajuan kontemporer yang tak ada henti. Masyarakat yang toleran adalah masyarakat yang saling menghargai dan menghormati adanya perbedaan yang ada, baik perbedaan pandangan, perbedaan pilihan politik, dan yang paling utama adalah perbedaan agama. Pada tahun 2024, mayoritas penduduk Kota Magelang beragama Islam, dengan persentase mencapai 85,7% dari total penduduk yang berjumlah 128,59 ribu jiwa. Agama lain yang juga ada di Kota Magelang adalah Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, serta aliran kepercayaan lainnya.

Peningkatan kesehatan dan status gizi dalam masyarakat sangat penting dalam upaya untuk meningkatkan kualitas manusia di berbagai dimensi, termasuk pendidikan dan produktivitas tenaga kerja. Jika dilihat dari aspek lembaga pendidikan, secara khusus ada total 60 institusi dalam klasifikasi TK, 74 lembaga dalam kategori Sekolah Dasar, sedangkan klasifikasi SMP terdiri dari 20 institusi, dan kategori Sekolah Menengah dan Sekolah Kejuruan masing-masing terdiri dari 13 dan 20 institusi. Selain dari aspek pendidikan, untuk mencapai kesehatan dan nutrisi yang optimal tidak hanya penting bagi generasi saat ini tetapi juga memiliki implikasi mendalam bagi generasi mendatang. Penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai sangat penting dalam inisiatif yang bertujuan memperbaiki profil kesehatan dan nutrisi individu. Tujuan ini dapat dicapai melalui dukungan simultan dari sektor pemerintah dan swasta. Warga Kota Magelang menikmati akses yang relatif mudah ke fasilitas kesehatan. Kota Magelang, meskipun ukuran geografisnya

sederhana, adalah rumah bagi enam rumah sakit umum dan lima pusat kesehatan. Selain itu, ada sejumlah besar profesional kesehatan yang tersedia untuk layanan, terdiri dari 452 dokter dan 60 dokter gigi, dilengkapi dengan 232 bidan dan 1.592 perawat.

F. Kondisi Politik

Tingkat partisipasi politik di Kota Magelang masih terbilang belum cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan partisipasi politik dalam pemilihan umum masih berada di bawah 90%. Pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024, tingkat partisipasi politik Kota Magelang berada pada angka 86%. Sedangkan pada pemilu walikota dan wakil walikota tahun 2024, tingkat partisipasi politik mengalami penurunan yang berada pada angka 79,33%.

Menurut data BPS pada Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Magelang, rasio ketergantungan yang cenderung menurun diperkirakan akan mencapai titik terendah pada periode 2020-2030. Pada periode itu akan terdapat peluang lebih besar yang dapat mendorong ekonomi untuk tumbuh. Hal ini jika sebagian besar dari mereka bekerja. Namun, di satu sisi masyarakat dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik jika di antara masyarakat banyak yang tidak bekerja. Sementara itu, jumlah masyarakat yang mendapatkan Pendidikan politik dan wawasan kebangsaan, dengan presentase penduduk usia pemilih pemula yang berpartisipasi dalam agenda politik adalah 6,5 %. Presentase masyarakat yang melek akan politik semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Sementara itu, Transformasi penyelenggaraan pemerintahan menjadi isu penting demi mewujudkan pembangunan kota yang lebih baik melalui pelayanan publik yang dinamis, transparan dan gesit. Tidak hanya sebagai upaya untuk mewujudkan good governance namun menjadi salah satu katalis dalam peningkatan daya saing daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu tata kelola pemerintahan perlu didukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju serta sumber daya aparatur yang semakin kapabel dan berintegritas. Peningkatan integritas aparat perlu didukung oleh pembentukan lingkungan yang kondusif bagi pengawasan

internal dan eksternal terhadap segala upaya yang mengarah pada pelanggaran integritas dalam pelayanan publik, proses pengadaan barang dan jasa, penanganan benturan kepentingan instansi, dan penggunaan anggaran. Untuk itu diperlukan intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye kepada seluruh pemangku kepentingan terkait upaya pencegahan yang telah dilakukan.

G. Kondisi Lingkungan

Kinerja yang ditunjukkan oleh pengelolaan lingkungan hidup dapat dijelaskan melalui metrik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Kemajuan inisiatif lingkungan untuk mengaktualisasikan pembangunan berkelanjutan yang diarahkan ke *smart enviroment*. Sebagai metrik keberhasilan pembangunan berkelanjutan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berfungsi sebagai patokan. Indeks ini secara kuantitatif mewakili keadaan kualitas lingkungan yang diperoleh dari penilaian Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Tanah (IKTL).

**Tabel 5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Tahun 2022-2024**

No.	Indikator	Tahun		
		2022	2023	2024
1.	Indeks Kualitas Air	65,00	66,67	56,67
2.	Indeks Kualitas Udara	81,16	85,92	86,83
4.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	28,07	27,85	35,88

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, Tahun 2024

Dari data dalam tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian Indeks Kualitas Air (IKA) pada tahun 2024 mengalami penurunan. Sedangkan Indeks Kualitas Udara (IKU) dan indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) pada tahun 2022-2024 mengalami peningkatan.

Saat ini, isu prioritas utama terkait lingkungan hidup di Kota Magelang adalah sampah, pencemaran air, permukiman, dan ruang terbuka hijau. Kota

Magelang terkait dengan permasalahan sampah, saat ini sedang menghadapi darurat sampah. Seiring waktu, administrasi dan layanan pemerintah mengalami transformasi dinamis yang mendorong pemikiran inovatif melalui pengenalan kemajuan yang ditujukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan meningkatkan kinerja pemerintahan. Pengelolaan sampah ini tidak hanya menjadi tantangan lokal tetapi juga masalah signifikan baik pada skala nasional maupun internasional. Dinas Lingkungan Kota Magelang menunjukkan komitmen untuk mengajak keterlibatan publik dalam pengelolaan sampah, dicontohkan oleh kegiatan seperti Sekolah Pengelolaan Sampah (SELAPAH). Tujuan utama Sekolah Pengelolaan Sampah (SELAPAH) adalah untuk mengurangi volume limbah yang diarahkan ke Tempat Pembuangan Sementara (TPSA) dengan menerapkan pemisahan sumber di dalam masyarakat. Selain itu, diantisipasi bahwa inisiatif ini akan memicu perubahan paradigma dalam pola pikir warga Kota Magelang mengenai pengelolaan limbah, transisi dari persepsi sampah hanya dikumpulkan, diangkut, dan dibuang di TPSA menjadi yang menekankan pemilahan, pengolahan, dan menciptakan nilai tambah dari limbah. Melalui penerapan metodologi SELAPAH, individu akan dibudidayakan sebagai katalis untuk perubahan transformatif dalam kerangka sosial pengelolaan limbah. Peserta penting akan menerima pendidikan ekstensif dan holistik yang mencakup aspek teoritis dan praktis dari pengelolaan sampah, dilengkapi dengan bimbingan pasca-pelatihan yang ketat. Inisiatif ini bertujuan untuk memfasilitasi pergeseran paradigma dari persepsi sampah untuk mengenalinya sebagai sumber daya yang berharga dan fungsional, sehingga membina hubungan yang saling menguntungkan dalam komunitas RT/RW mengenai praktik pengelolaan limbah.

Pengembangan iklim investasi di Magelang merupakan salah satu upaya untuk menyerap tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran. Salah satu poin penting dalam dalam pencapaian hal tersebut adalah dengan pengembangan wajah kota yang semakin indah, bersih juga keteraturan tata ruangnya sehingga meningkatkan sinergitas daerah. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan melalui penataan ruang terbuka hijau di

daerah. Pemerintah Kota Magelang memberikan akses kepada masyarakat untuk terlibat dalam implementasi penataan RTH. Presentase Ruang Terbuka Hijau pada tahun 2024 seluas 300,22 Ha (16%), RTH Rencana berdasarkan RTRW Kota Magelang Tahun 2011-2031 yaitu 70,78 Ha. RTH mempunyai proporsi paling sedikit 30% dari luas wilayah Kota Magelang, yang diisi oleh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam. RTH sebesar 30% tersebut terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. RTH tersebar di seluruh wilayah Kota Magelang. Ruang Terbuka Hijau memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat Kota Magelang, diantaranya sebagai paru-paru kota, mengurangi polusi dan pencemaran udara, mengatur iklim mikro, estetika atau keindahan, menjaga keseimbangan ekologis, dan menjaga kesuburan tanah. Peningkatan pengelolaan RTH publik sebagai daya tarik kota untuk menarik wisatawan dan investasi dengan tetap menjaga dan memperhatikan fungsinya untuk konservasi keanekaragaman hayati. Terkait dengan pengelolaan RTH untuk keanekaragaman hayati, terdapat keterbatasan lahan untuk konservasi keanekaragaman hayati serta proyek kegiatan fisik seperti peningkatan jalan yang menyebabkan pengurangan pohon sehingga berpengaruh kepada keanekaragaman tanaman. Untuk itu perlu penambahan luasan RTH untuk keanekaragaman hayati serta penggantian tanaman yang terkena kegiatan peningkatan jalan dengan konsep konservasi keanekaragaman hayati. Perlu adanya peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan dan pengelolaan RTH publik serta peningkatan koordinasi dan integrasi dan sinkronisasi lintas sektor pengelolaan RTH serta peningkatan kapasitas kelembagaan.

H. Lanskap RTH Publik Kebun Raya Gunung Tidar

Berdasarkan hasil penelusuran, Gunung Tidar merupakan elemen penting dalam evolusi Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI), yang saat ini diakui sebagai Akademi Militer (Akmil). Berbagai sektor Gunung Tidar secara historis digunakan sebagai fasilitas pelatihan militer. Gunung Tidar dicirikan sebagai daerah deforestasi tanpa pepohonan, sebagian besar ditutupi dengan rumput. Daerah lembah yang luas dan datar secara rutin

digunakan untuk berbagai kegiatan termasuk pelatihan militer, pengejaran berkuda, pendaratan pesawat, arena olahraga motor, dan upaya serupa. Pada 1960-an, upaya bersama untuk reboisasi dilakukan di Gunung Tidar melalui pengenalan pohon pinus (*Pinus merkusii*). Selanjutnya, Gunung Tidar telah mengalami peningkatan inisiatif penanaman pohon secara bertahap yang menggabungkan beragam spesies, termasuk Mahoni, Khaya, dan Damar yang tersebar luas di sepanjang pendakian ke puncak Kebun Raya Gunung Tidar.

Awalnya, Gunung Tidar berfungsi sebagai hutan kota, namun pada tahun 2019 Pemerintah Kota Magelang memulai pengembangan kebun raya yang mengarah pada reklasifikasi resmi Kawasan Gunung Tidar menjadi Kebun Raya Gunung Tidar (KRG T) pada 12 Januari 2021. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kebun Raya, Kebun Raya diartikan sebagai kawasan konservasi tumbuhan secara *ex situ* yang mempunyai koleksi tumbuhan terdokumentasi dan tertata. Kebun Raya Gunung Tidar ini memiliki puncak mencapai 503 meter di atas permukaan laut dengan luas kawasan mencapai 701.674 m² dengan anak tangga berjumlah 1.002. Adanya Ruang Terbuka Hijau Publik Kebun Raya Gunung Tidar memberikan manfaat yang cukup signifikan bagi masyarakat Kota Magelang yaitu sebagai paru-paru kota, mengurangi polusi dan pencemaran udara.

Pengelolaan RTH Publik Kebun Raya Gunung Tidar berdasarkan pada Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Kebun Raya Gunung Tidar pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, pengelolaan Kebun Raya Gunung Tidar dilaksanakan oleh Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Kebun Raya Gunung Tidar yang merupakan teknis operasional yang dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dalam naungan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang. Berikut merupakan pelaku yang terlibat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kebun Raya Gunung Tidar meliputi:

1. Kepala UPT Kebun Raya Gunung Tidar

Kepala UPT Kebun Raya Gunung Tidar memiliki tugas Kepala Dinas dalam pelaksanaan pengelolaan RTH Kebun Raya Gunung Tidar berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berikut Fungsi dan Tugas Kepala UPT Kebun Raya Gunung Tidar:

1.) Fungsi :

- Pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan UPT Kebun Raya Gunung Tidar
- Pengoordinasian dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pada UPT Kebun Raya Gunung Tidar
- Pelaksanaan kegiatan UPT Kebun Raya Gunung Tidar
- Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.

2.) Tugas :

- Menyusun rencana program dan kegiatan UPT Kebun Raya Gunung Tidar
- Mengumpulkan, mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan pelayanan UPT Kebun Raya Gunung Tidar
- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
- Melaksanakan kegiatan konservasi tanaman ex situ di Kebun Raya Gunung Tidar
- Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendukung di Kebun Raya Gunung Tidar
- Melaksanakan penelitian bidang konservasi ex situ di Kebun Raya Gunung Tidar dan di luar Kebun Raya Gunung Tidar
- Mengembangkan Kebun Raya Gunung Tidar menjadi kawasan wisata yang nyaman, bernilai ilmiah/edukasi dan berwawasan lingkungan

- Melaksanakan perlindungan dan pengamanan Kebun Raya Gunung Tidar dari aktivitas perambahan, penebangan liar, pemanfaatan lahan liar, tanpa ijin dan ancaman bahaya kebakaran
- Melaksanakan pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain daerah serta menyetorkan ke kas umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Memberi petunjuk, menyelia, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan
- Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan UPT Kebun Raya Gunung Tidar
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan.

2. Kepala Sub bagian Tata Usaha UPT Kebun Raya Gunung Tidar

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Kebun Raya Gunung Tidar mempunyai tugas membantu Kepala UPT Kebun Raya Gunung Tidar untuk melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum serta pengumpulan data dan penyusunan laporan.

1.) Fungsi

- Pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan
- Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan dan kearsipan
- Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian
- Pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

2.) Tugas

- Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha
- Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta laporan kegiatan UPT Kebun Raya Gunung Tidar

- Menyiapkan bahan perencanaan, pembinaan, pengendalian dan pengembangan pelayanan UPT Kebun Raya Gunung Tidar
- Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data pelayanan UPT Kebun Raya Gunung Tidar
- Melaksanakan pengelolaan inventaris dan menyusun rencana kebutuhan barang kantor
- Melaksanakan dan mengatur urusan rumah tangga
- Melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan pengelolaan urusan keuangan UPT Kebun Raya Gunung Tidar
- Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan
- Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Tata Usaha
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan.

I. Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau Publik

Kebun Raya Gunung Tidar merupakan salah satu dalam kelompok RTH Publik yang mempunyai fungsi sebagai rekreasi, estetika, serta kegunaan fungsi kepentingan masyarakat di Kota Magelang. Kebun Raya Gunung Tidar sebagai bagian dari ekosistem yang sangat penting bagi wilayah Kota Magelang, karena memiliki peranan sebagai jantung kota atau paru-paru kota. Manfaat lain RTH Publik Kebun Raya Gunung Tidar meliputi:

1. Kebun Raya Gunung Tidar merupakan daerah sebagai resapan air hujan untuk menjaga ketersediaan air bawah tanah bagi daerah sekitar Kota Magelang.

2. Kebun Raya Gunung Tidar dapat menjadi tempat studi serta penelitian dengan beragamnya flora dan fauna yang ada.
3. Adanya kerapatan pohon-pohon Kebun Raya Gunung Tidar juga memiliki pengaruh untuk menekan polusi udara serta menghasilkan oksigen. Hal ini tentu berpengaruh pada kondisi iklim makro di daerah Kota Magelang.
4. Kebun Raya Gunung Tidar juga dapat meningkatkan nilai estetika bentang alam Kota Magelang.

BAB IV

PROSES PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK KEBUN RAYA GUNUNG TIDAR KOTA MAGELANG

Pada Bab 4 ini, penulis akan membahas terkait proses partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik. Proses ini akan penulis sajikan dari kerangka berfikir Cohen dan Uphoff (1980). Dari kacamata teori partisipasi masyarakat ini, akan menjadi fokus utama yang dibagi menjadi 4 topik pembahasan meliputi: partisipasi dalam pengambilan keputusan (*participation in decision making*), partisipasi dalam pelaksanaan (*participation in implementation*), partisipasi dalam pengambilan manfaat (*participation in benefit*), dan partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*).

A. Inisiasi perencanaan Hutan Kota menjadi Kebun Raya Gunung Tidar

Partisipasi dalam pengambilan keputusan (*participation in decision making*) menurut Cohen and Uphoff 1980 menyimpulkan bahwa masyarakat harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak boleh ditetapkan sepihak supaya tidak dikuasai oleh oknum yang mempunyai kepentingan pribadi, oleh karena itu keputusan harus dibuat untuk kesejahteraan masyarakat. Ruang Terbuka Hijau Kebun Raya Gunung Tidar dilatar belakangi dari adanya kebijakan dari Pemerintah Kota Magelang yang menginisiasi Gunung Tidar yang berstatus sebagai Hutan Kota menjadi Kebun Raya, hal ini menjadi salah satu respon yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang dalam menjaga flora dan fauna dan konservasi sumber daya alam. Inisiatif konservasi ini dirancang untuk secara nyata mengurangi jumlah flora Indonesia yang berisiko punah dan untuk menjaga spesies dari klasifikasi terancam punah. Selain itu, konsep ini bisa digunakan untuk pendidikan, penelitian, jasa lingkungan dan wisata religi dengan pengelolaan Kebun Raya Gunung Tidar sebagai kawasan konservasi dan Ruang Terbuka Hijau.

1. Peralihan status Hutan Kota menjadi Kebun Raya

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan awal dalam pengelolaan RTH Publik Kebun Raya Gunung Tidar ini diawali dengan adanya peralihan status Hutan Kota menjadi Kebun Raya serta penetapan nama Kebun Raya. Dalam inisiasi ini apakah terdapat keterlibatan masyarakat didalamnya atau tidak, hal ini disampaikan oleh Teknisi Pengelola Kebun Raya Gunung Tidar:

“Kalau peralihan status itu mutlak keputusan dari Pemerintah Kota Magelang dan dulu itu prosesnya panjang mbak dari 2017. Tapi, kalau peralihan nama tuh dulu pernah dilakukan FGD (forum discussion group) dan kuisisioner sepertinya dengan masyarakat. Entah dalam bentuk FGD, Sosialisasi, ataupun kuisisioner. Tapi dulu yang saya tau ada dokumennya yang berkaitan dengan masyarakat adalah pemberian beberapa opsi nama Kebun Raya Gunung Tidar ini dan ada scoreing nya. Seperti Kebun Raya Gunung Tidar, Kebun Raya Tidar, Kebun Raya Bukit Tidar. Namun dahulu masih dikelola oleh Dinas Pertanian dibawah salah satu seksi dan belum dikelola Dinas Lingkungan Hidup. Jadi, inisiasi perencanaan awal atau masterplan terkait dengan Kebun Raya ini berbeda dinas.” (wawancara pada Teknisi Pengelola UPT Kebun Raya Gunung Tidar pada tanggal 6 Februari 2025).

Terkait hal ini, penulis juga mengkonfirmasi kepada masyarakat, apakah dalam keputusan alih fungsi status dan nama Gunung Tidar menjadi Kebun Raya juga melibatkan adanya peran masyarakat. Menurut Ketua RW 6 mengatakan bahwa:

“Kalau terlibat secara langsung sih enggak ya, tapi kita sebagai masyarakat tetap menerima segala keputusan dari pemerintah kota, dan insyaallah pemerintah kota akan membuat kita lebih baik. Karena Kebun Raya itu angan-angan dari Pemerintah Kota dan dulu cuma sosialisasi agar Gunung Tidar menjadi Kebun Raya supaya tambah ramai, terkenal, dan banyak pengunjungnya dan supaya bermanfaat bagi warga

sekelilingnya.” (wawancara kepada ketua RW 6, pada tanggal 12 Februari 2025)

Wawancara diatas menunjukan tidak adanya keterlibatan masyarakat secara langsung dalam perpindahan Hutan Kota menjadi Kebun Raya. Hal ini juga diperkuat oleh Ketua RW 10. Beliau mengatakan bahwa :

“Waktu itu seingat saya gaada kalo sosialisasi atau rembug warga untuk perpindahan ini, cuman dulu ya ada informasi aja dari mulut ke mulut kalau Gunung Tidar ini mau dikembangkan menjadi Kebun Raya oleh pemerintah. Supaya lebih baik lagi buat kedepannya dan kita juga tetap mendukung soal itu. Kalo selain itu ya Cuma pemberitahuan aja dari pemerintah.” (wawancara kepada ketua RW 10, pada tanggal 12 Februari 2025)

Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwasannya menurut Ketua RW 6 dan 10, masyarakat tidak terlibat secara langsung dalam keputusan awal perubahan status Gunung Tidar menjadi Kebun Raya karena mutlak keputusan dari Pemerintah Kota Magelang, namun terdapat indikasi partisipasi masyarakat dalam penetapan nama Kebun Raya Gunung Tidar saat ini. Hal ini karena Gunung Tidar awalnya dikelola oleh Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kota Magelang. Namun, hal ini juga diperkuat dari adanya informan dari kassubag di UPT Kebun Raya Gunung Tidar. Beliau menerangkan bahwa :

“Ya Perpindahan ini inisiasi nya dari Pemerintah Kota Magelang, namun perubahan ini juga ga dilaksanakan secara instan, namun ada beberapa peninjauan secara bertahap dan prosesnya panjang dari tahun 2017. Selain itu juga pasti ada masterplan dll. Tapi, kalau lebih detailnya waktu itu Gunung Tidar masih dibawah naungan dinas pertanian.” (wawancara pada Kassubag Pengelola UPT Kebun Raya Gunung Tidar pada tanggal 6 Februari 2025).

Pemerintah Kota Magelang mengubah status Gunung Tidar menjadi Kebun Raya untuk menghindari peralihan pengelolaan dari Pemerintah Kota ke Pemerintah Pusat. Hal ini sesuai dengan UU 23/2014 tentang Pemerintahan

Daerah mengatur otonomi daerah, termasuk pengelolaan taman hutan raya di kabupaten/kota. Oleh karena itu, Gunung tidar beralih fungsi menjadi Kebun Raya sebagai kawasan konservasi tanpa menghilangkan konsep sebelumnya dan tetap sebagai fungsi hijau. Pada awalnya, Pemerintah Kota Magelang melalui Bappeda melakukan pengkajian serta peninjauan yang panjang pada tahun 2017. Dengan melalui proses penetapan kawasan, peninjauan lokasi, survei ke masyarakat di kawasan penyanggah dan master plan, LIPI menilai Gunung Tidar layak menjadi Kebun Raya. Setelah adanya keputusan resmi dari LIPI tentang kelayakan status Gunung Tidar menjadi Kebun Raya, dilanjutkan dengan MoU antara Pemerintah Kota Magelang dengan LIPI. Menurut teori Cohen dan Uphoff 1980 apabila masyarakat setempat tidak dapat berpartisipasi dalam keputusan awal, maka dapat berpartisipasi pada keputusan yang sedang berlangsung. Keputusan berlangsung yang terjadi setelah keputusan awal dibuat mungkin lebih penting, seperti mencari kebutuhan, prioritas baru dan mengoprasikan program dengan cara yang paling memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Pembentukan tim monev

Setelah ditetapkannya Gunung tidar menjadi Kebun Raya pada tanggal 12 januari 2021, keterlibatan dalam perencanaan dalam pembangunan RTH Kebun Raya Gunung Tidar ini melibatkan beberapa unsur dan tidak berpusat pada pemerintah saja. Keterlibatan ini berasal dari tokoh masyarakat sekitar RTH Kebun Raya Gunung Tidar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, BRIM/LIPI, dan Akademi Militer Kota Magelang. Hal ini disampaikan langsung Teknisi Pengelola UPT Kebun Raya Gunung Tidar, beliau menyampaikan bahwa :

“Dulu setelah ditetapkannya Hutan Kota menjadi Kebun Raya, dari Pemerintah Kota menyerahkan sepenuhnya pengelolaan ini kepada UPT Kebun Raya Gunung Tidar. Lalu dari kita langsung membentuk tim monev yaitu monitoring, pelaporan, dan evaluasi. Ya tim ini dilaksanakan setiap 1 bulan sekali dan rutin setiap bulannya. “ (wawancara pada Teknisi Pengelola UPT Kebun Raya Gunung Tidar pada tanggal 6 Februari 2025).

Dalam wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang tinggal di kawasan Kebun Raya Gunung Tidar terdapat indikasi partisipasi dalam pengambilan keputusan berjalan, seperti penyampaian ide atau gagasan melalui forum monitoring dan evaluasi. Forum ini dibentuk supaya pemangku kepentingan serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan RTH Kebun Raya Gunung Tidar ini dapat dengan mudah menyampaikan aspirasi mereka terkait ide pengembangan RTH Kebun Raya Gunung Tidar. Hal ini supaya tidak sepenuhnya keputusan hanya dari pemerintah saja, melainkan masyarakat juga dilibatkan dalam peran ini. Selain adanya wawancara tersebut, data diperkuat dari adanya foto rapat tim monev sebagai berikut :

Figure 4 Rapat Tim Monev



Sumber : Arsip UPT Kebun Raya Gunung Tidar.

Selain keputusan awal dan keputusan berjalan, terdapat juga keputusan operasional dalam tahap pengambilan keputusan partisipasi masyarakat. Pada tahap ini, dilihat dari adanya keterlibatan orang atau melibatkan masyarakat dalam mewujudkan tujuan yang dicapai. Dalam masyarakat yang tinggal dikawasan Kebun Raya Gunung Tidar, terdapat beberapa tokoh masyarakat yang menjadi perwakilan dalam penyampaian aspirasi masyarakat sekitar.

Tokoh masyarakat ini terdiri dari Ketua RW 6,7,10, dan 12. Dari adanya RW setempat yang menjadi perwakilan, masyarakat akan dengan mudah menyampaikan masukan, ide ataupun kritikan. Hal ini disampaikan oleh ketua RW 10, beliau mengatakan bahwa :

“Walaupun dari segi inisiasi perpindahan dari Gunung Tidar ke Kebun Raya mutlak dari Pemerintah Kota Magelang, kita tidak ada masalah. Asalkan semuanya menjadi lebih baik kedepannya. Setelah penetapan itu saya langsung diajak ke UPT untuk rapat monev itu setiap 1 bulan sekali dan ya saya tentu hadir buat perwakilan masyarakat ataupun masukan dari ide-ide masyarakat di RW saya. Ya ini termasuk memudahkan lahya buat membahas apapun itu.” (wawancara kepada ketua RW 10, pada tanggal 12 Februari 2025)

Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa, dalam peran konsultatif masyarakat juga berhak memberikan saran atau masukan kepada Pemerintah Kota Magelang yang menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan seta hasil akhir suatu keputusan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis pada tahap pengambilan keputusan yang berpedoman pada teori partisipasi masyarakat Cohen & Uphoff (1980), penulis menyimpulkan bahwa pada tahapan keputusan awal, masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dalam peralihan status Gunung Tidar sebagai Hutan Kota menjadi Kebun Raya. Hal ini murni keputusan dari Pemerintah Kota Magelang untuk mengatasi adanya peralihan pengelolaan dari Pemerintah Kota ke Pemerintah Pusat. Pada tahapan pengambilan keputusan berjalan, masyarakat serta berbagai elemen pemerintah kota dilibatkan dalam penyampaian ide pengembangan Kebun Raya. Selanjutnya pada tahapan pengambilan keputusan operasional dicirikan dengan adanya tokoh masyarakat seperti ketua RW yang memiliki peran cukup signifikan sebagai perwakilan secara langsung dari masyarakat setempat. Inisiasi pembangunan Hutan Kota menjadi Kebun Raya Gunung Tidar adalah dari Pemerintah Kota, namun faktor dari adanya keberhasilan pembangunan juga memerlukan adanya Partisipasi Masyarakat.

B. Kontribusi Sumber Daya dalam Aspek Pembangunan Fasilitas Kebun Raya Gunung Tidar

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan partisipasi dalam pembentukan kebijakan, partisipasi pada tahap ini terindikasi adanya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Adapun unsur-unsur dalam implementasi dapat menyangkut kontribusi sumberdaya berupa tenaga, uang, barang material atau informasi serta kegiatan koordinasi dengan pemerintah (Cohen & Uphoff, 1980). Partisipasi masyarakat dalam tahap implementasi pada Kebun Raya Gunung Tidar, ditunjukkan dengan adanya :

1. Kontribusi tenaga berupa keikutsertaan dalam pembangunan jalan menuju puncak.

Anggota masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam proses konstruksi, menyumbangkan tenaga kerja dan upaya mereka. Keterlibatan ini sangat penting karena tidak hanya membantu dalam pengembangan fisik jalan tetapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan di antara penduduk. Partisipasi masyarakat dalam hal ini menunjukkan komitmen kolektif untuk meningkatkan akses ke kebun raya, yang dapat meningkatkan pariwisata dan keterlibatan lokal. Upaya kolaboratif dalam membangun jalan membantu memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat. Bekerja bersama pada tujuan bersama menumbuhkan hubungan dan kepercayaan di antara penduduk, yang dapat mengarah pada peningkatan kerja sama dalam proyek komunitas di masa depan. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh petugas UPT Kebun Raya Gunung Tidar, beliau mengatakan bahwa :

“Kalau dari segi pembangunan kebun raya tentu tidak secara langsung ya, namun kalau di ranah RTH ya dipenanaman itu. Namun, kalau dari segi pengerjaan jalan naik itu ada beberapa dari masyarakat itu ada juga. Misalnya tukangnyanya dari masyarakat disekitar sini. Tapi kalo penganggaran dll ya pasti diluar itu.” (wawancara pada Kassubag UPT Kebun Raya Gunung Tidar pada tanggal 6 Februari 2025)

Dari wawancara diatas, pengelola dari UPT Kebun Raya Gunung Tidar mengatakan bahwa terdapat adanya kontribusi dalam pembangunan jalan oleh

masyarakat sekitar. Hal ini juga dikuatkan dengan opini masyarakat sekitar yang mengatakan bahwa :

“ Kalau dari masyarakat sumbangsihnya ya cuma ikut dari sisi tenaga aja ya dan gotong royong dalam pembangunan jalan itu kan cukup panjang. Jadi ya kita ikut bantu-bantu lah disitu. .(wawancara pada masyarakat RW 6 pada tanggal 12 Februari 2025)

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa memang terdapat indikasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan. Terkait pembangunan ini, masyarakat dari RW 10 juga mengkonfirmasi terkait hal ini, beliau mengatakan bahwa :

“ya kita masyarakat cuma gotong royong aja dalam pembangunan ini, karena kebetulan bersinggungan langsung dengan Kebun Raya. Cuma sebatas itu sih, karena kan setelah ditetapkannya menjadi Kebun Raya Gunung Tidar wewenang ini menjadi urusan UPT Kebun Raya Gunung Tidar.”(wawancara pada masyarakat RW 10 pada tanggal 12 Februari 2025)

Dari beberapa wawancara diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa masyarakat terlibat dalam implementasi dalam sisi pembangunan pengerjaan jalan. Hal ini dikarenakan selebihnya tentang Kebun Raya tetap ada koordinasi antara masyarakat dan UPT Kebun Raya karena masih menjadi wewenang pihak pengelola. Namun, kohesi sosial ini sangat penting untuk keberlanjutan jangka panjang dari inisiatif masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan jalan juga dapat mempengaruhi tata kelola daerah. Ketika penduduk terlibat dalam proyek-proyek semacam itu, mereka lebih cenderung terlibat dengan otoritas lokal dan mengadvokasi kebutuhan dan kepentingan mereka. Dinamika ini dapat mengarah pada komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat, yang pada akhirnya menghasilkan tata kelola yang lebih responsif. Pembangunan jalan tidak hanya melayani kebutuhan mendesak tetapi juga memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Peningkatan akses dapat menyebabkan peningkatan pariwisata, peluang ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup bagi penduduk. Energi dan upaya yang diinvestasikan oleh masyarakat dalam proyek ini dapat

menghasilkan pengembalian yang signifikan dalam hal pembangunan sosial dan ekonomi.

Masyarakat juga berkontribusi dalam fasilitas sarana prasarana RTH Kebun Raya Gunung Tidar berupa loket tiket, toilet umum, mushola, taman bermain, dan bangku taman untuk beristirahat. Masyarakat disekitar kawasan membantu yang sifatnya tidak terlalu berat. Selain kontribusi dari sisi tenaga, terdapat juga hibah yang disalurkan melalui masyarakat disekitar kawasan. Hal ini disampaikan oleh Teknisi Pengelola Kebun Raya Gunung Tidar:

“Dulunya juga ada hibah dari pengunjung yang disalurkan melalui masyarakat sini. Hibah ini digunakan untuk membangun fasilitas berupa pembangunan jalan naik, membangun mushola, dll. Walaupun tidak secara langsung dari masyarakat sekitar, namun tanpa adanya koordinasi dengan warga sini juga pasti tidak bisa.” (wawancara pada Teknisi Pengelola UPT Kebun Raya Gunung Tidar pada tanggal 6 Februari 2025).

Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwasannya masyarakat tidak berkontribusi secara langsung dalam sumber daya berupa uang atau barang material. Hal ini dikarenakan dana untuk membangun RTH Kebun Raya Gunung Tidar berasal dari APBD Kota Magelang. Kesimpulannya, kontribusi partisipasi masyarakat dalam pembangunan jalan menuju puncak Gunung Tidar adalah beragam, meliputi keterlibatan aktif, pembagian sumber daya, kohesi sosial, dan dampak potensial terhadap tata kelola daerah. Meskipun ada tantangan, manfaat keseluruhan menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan ruang publik dan infrastruktur.

2. Adanya pekerja lokal di Kebun Raya Gunung Tidar

Partisipasi pada tahap koordinasi dicirikan dengan adanya pekerja lokal di Kebun Raya Gunung Tidar. Pekerja lokal memberikan tenaga kerja penting untuk berbagai tugas di dalam kebun raya, termasuk pemeliharaan, lanskap, dan layanan pengunjung. Pekerjaan ini tidak hanya menawarkan dukungan keuangan kepada individu-individu ini tetapi juga berkontribusi pada ekonomi lokal dengan mengedarkan pendapatan di dalam masyarakat. Kehadiran pekerja lokal memastikan bahwa taman terawat dengan baik dan dapat diakses

oleh pengunjung, meningkatkan daya tarik dan fungsinya. Keterlibatan pekerja lokal menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat dan kebanggaan di kebun raya. Ketika penduduk dipekerjakan di lingkungan lokal mereka, mereka lebih cenderung mengambil minat aktif dalam pemeliharaan dan pengembangannya. Keterlibatan ini dapat mengarah pada peningkatan partisipasi dalam acara dan inisiatif masyarakat, memperkuat ikatan sosial di antara penduduk. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Kassubag UPT Kebun Raya Gunung Tidar, beliau mengatakan bahwa :

“Di Kebun Raya ini ada namanya padat karya kalau kita menyebutnya. Jadi, terdapat pekerja lokal yang bekerja disini. Dan kebanyakan dari mereka sih yang bekerja disini dari dulu sebelum alih fungsi menjadi Kebun Raya. Tapi karena sekarang Kebun Raya ini semakin berkembang seiring dengan pengelolaannya maka dari itu, pekerjanya ditambah. Dan total sekarang yang bekerja disini ada 54 karyawan” (wawancara pada Kassubag Pengelola UPT Kebun Raya Gunung Tidar pada tanggal 6 Februari 2025)

Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa Dimana terdapat bina lingkungan yang di dominasi oleh masyarakat Kota Magelang dan masyarakat sekitar kawasan yang terdiri dari 54 karyawan yaitu 6 ASN dan 48 TKL. Masyarakat yang bekerja disini sebagian besar dari pekerja sebelum alih fungsi Gunung Tidar menjadi Kebun Raya. Sehingga masyarakat yang sebelumnya bekerja walaupun adanya alih fungsi tidak akan kehilangan pekerjaan mereka. Bahkan, 54 karyawan ini sudah termasuk pekerja baru setelah alih fungsi. Hal ini juga diperkuat dari data pekerja yang ada di Kebun Raya Gunung Tidar :

Figure 5 Data Karyawan Kebun Raya Gunung Tidar 2024

No	Nama	Tugas PK
1	MUWAHIDIN, S.Sos	Pit. Kepala UPT dan Kasubbag (ASN)
2	ROCHMAD PUJI	Pengadministrasi Umum (ASN)
3	ANIDA METHA A, S.Si	Analisis Perkebunrayaan (ASN)
4	IKA PRATIWI, S.Si	Analisis Perkebunrayaan (ASN)
5	SATRIO AGUNG LAKSONO, A.Md	Teknisi Perkebunrayaan (ASN)
6	ABDUL ROCHIM	Petugas Kebersihan (Sapuan)
7	AGUS SUSANTO	Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan
8	ANANDA PUTRA BAGUS PRATAMA, S.P.	Tenaga Administrasi
9	ANITA RAKHMAWATI	Petugas Kebersihan (Sapuan)
10	ANTON WIDIYANTO	Kebersihan Kantor
11	ARI BUDI WIBOWO, S.E.	Petugas Penerima Tamu
12	ARI SETYAWAN	Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan
13	ARVITA OKTAVIANA	Tenaga Administrasi
14	ARYA AGUNG PRABOWO	Petugas Kebersihan (Sapuan)
15	ASEP HARIYADI	Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan
16	AVINAS	Petugas Kebersihan (Sapuan)
17	BUDI PURNOMO	Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan
18	BUDI SUTIKNYO	Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan
19	DEKA AKBAR HANANTO	Petugas Kebersihan (Sapuan)
20	DIVA ODIARDI DWINANDA	Petugas Kebersihan (Sapuan)
21	DJUWANDI	Petugas Kebersihan (Sapuan)
22	EFFENDI PRABOWO	Petugas Kebersihan (Sapuan)
23	FARREL PUTRA PERDANA	Petugas Kebersihan (Sapuan)
24	GALANG ARDIAN SAPUTRA	Pemandu Wisata
25	GIARTI	Petugas Kebersihan (Sapuan)
26	HARIS ERWANTO	Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan
27	IHSAN PRASETYA	Pemandu Wisata
28	KUAT SANTOSA	Tenaga Pengamanan
29	MOHAMMAD RIZQI ARDIYANTO	Pemandu Wisata
30	MUHAMAD MAHSUN AMIN	Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan
31	MUHAMMAD ENRICO ADITYA SETYAWAN	Kebersihan Kantor
32	MUJI HARYANTO	Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan
33	RITA HANARIYANTO	Petugas Kebersihan (Sapuan)
34	RIVALDO VEROSA PERDANA	Petugas Kebersihan (Sapuan)
35	SABARUDIN	Petugas Kebersihan (Sapuan)
36	SULISTIYONO	Petugas Kebersihan (Sapuan)
37	SUMARNO	Petugas Kebersihan (Sapuan)
38	SUPARDI	Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan
39	SUPIYAH LESTARI	Petugas Kebersihan (Sapuan)
40	SUPRIYADI	Tenaga Kebersihan Sungai
41	SUPRIYATI	Petugas Kebersihan (Sapuan)
42	SURADIYO	Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan
43	SURATMAN	Tenaga Pengamanan
44	SURYA AGUNG	Tenaga Administrasi
45	TILON ARY SETYADI	Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan
46	TONO SUTOPO	Tenaga Pengamanan
47	TUGIMIN	Kebersihan Kantor
48	WAHYU SANTOSO	Pemandu Wisata
49	WAHYU SLAMET INDRA ADI NUGROHO	Tenaga Kebersihan Sungai
50	WAWAN	Tenaga Pengamanan
51	WISNU DWI YULIANTO, S.Kom.	Tenaga Administrasi
52	YANUAR HERU PRASETYO	Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan
53	YOGO PRIYONO	Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan
54	ZAENAL FAHRI	Petugas Kebersihan (Sapuan)

Sumber : UPT Kebun Raya Gunung Tidar

Dalam hal ini pekerja lokal sering membawa pengetahuan berharga tentang ekosistem lokal dan praktik budaya ke peran mereka di kebun raya. Keakraban mereka dengan tanaman asli dan teknik pengelolaan lahan tradisional dapat meningkatkan keanekaragaman hayati dan upaya keberlanjutan taman. Pengelolaan ini sangat penting untuk melestarikan warisan alam daerah tersebut dan mendidik pengunjung tentang ekologi lokal. Masyarakat sekitar di Kebun Raya Gunung Tidar sangat penting untuk operasi dan keberhasilannya.

Keterlibatan mereka tidak hanya mendukung pemeliharaan taman tetapi juga memperkuat ikatan masyarakat, mempromosikan pengelolaan budaya, dan memengaruhi pemerintahan lokal. Mengatasi tantangan yang dihadapi oleh para pekerja ini sangat penting untuk memaksimalkan manfaat partisipasi mereka dan memastikan keberlanjutan kebun raya. Selain itu, Bina Lingkungan ini menjadi peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan serta berkontribusi dalam pemeliharaan taman. Masyarakat yang bekerja di RTH Kebun Raya Gunung Tidar, berkontribusi dalam kegiatan perawatan dan pemeliharaan. Hal ini merupakan aspek penting dalam manajemen fasilitas. Standarisasi pekerjaan pemeliharaan taman diperlukan untuk meningkatkan kualitas RTH dan menjaga keindahan serta fungsinya. Pemeliharaan secara rutin juga mempengaruhi keindahan dan kenyamanan pengunjung Kebun Raya Gunung Tidar. Selain itu, perawatan dalam fasilitas bangunan juga tidak kalah pentingnya. Hal ini bertujuan supaya fasilitas dapat beroperasi dengan baik dan menjaga fungsi agar pengunjung tetap nyaman. Pengelola juga turut serta memberikan kontribusi dalam kegiatan pengawasan RTH Kebun Kebun Raya Gunung Tidar.

Masyarakat yang tinggal disekitar kawasan dan tidak bekerja di Kebun Raya Gunung Tidar, tetap berkontribusi dalam bentuk pemeliharaan ringan dan kontribusi dalam bentuk pengawasan keamanan dan kenyamanan Kebun Raya. Walaupun sebagian masyarakat juga memiliki pekerjaan profesionalnya, hal ini supaya kualitas dan kuantitas RTH tidak menurun, yang nantinya akan mempengaruhi kualitas lingkungan dan kesempatan dalam interaksi sosial. Keterlibatan masyarakat juga memiliki peran sangat penting, seperti berkontribusi dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan ketenteraman di lingkungan tempat tinggal. Maka dari itu, masyarakat tetap merasa perlu untuk menjaga RTH Kebun Raya Gunung Tidar. Masyarakat memanfaatkan RTH untuk berbagai aktivitas, termasuk rekreasi, relaksasi, dan kegiatan sosial. Dari beberapa aktivitas yang dilakukan pengunjung, karena RTH Kebun Raya Gunung Tidar menjadi ruang publik tetap ada himbauan untuk tidak menyalahgunakan aturan yang sudah ditetapkan. Namun, tetap saja terdapat

tindakan pengunjung yang menyalahgunakan Kebun Raya Gunung Tidar. Seperti membuang sampah sembarangan, merokok, dll. Selain adanya himbauan, perbuatan ini juga perlu adanya kesadaran dari pengunjung itu sendiri. Walaupun setiap pos sudah terdapat tempat sampah yang disediakan oleh pengelola RTH, sebagian pengunjung merasa acuh tak acuh akan hal ini. Namun, untuk mengatasi hal seperti ini pengelola Kebun Raya Gunung Tidar menginisiasi untuk membuat papan peraturan atau tata tertib yang dapat dibaca oleh pengunjung sebelum memasuki area Kebun Raya Gunung Tidar. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pengunjung dapat menaati segala peraturan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis dalam partisipasi pada tahap implementasi yang berpedoman pada teori Cohen & Uphoff (1980), penulis menyimpulkan terdapat partisipasi dalam bentuk tenaga dalam tahap pembangunan, namun tidak dari segi uang atau barang material. Selain itu, dalam administrasi masyarakat dilibatkan dalam partisipasi sebagai karyawan yang dipekerjakan secara lokal. Hubungan dalam dimensi partisipasi ini bersifat sukarela dan tidak terdapat paksaan, dimana kontribusi tersebut diberikan secara kolektif. Pekerja lokal dapat dimobilisasi untuk melakukan kegiatan seperti menanam pohon atau memelihara ruang hijau, tetapi keterlibatan mereka terbatas pada pelaksanaan arahan dari pemimpin pemerintah atau organisasi. Sementara masyarakat menyumbangkan tenaga kerja, kemampuan mereka untuk mempengaruhi kebijakan atau mengekspresikan kebutuhan mereka dibatasi. Ini menciptakan dinamika di mana kontribusi mereka dipandang sebagai instrumental untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan daripada sebagai wawasan berharga ke dalam pengelolaan proses partisipasi. Ketika masyarakat diperlakukan sebagai tenaga kerja, itu merusak potensi untuk membangun ikatan komunitas yang kuat dan menumbuhkan rasa memiliki. Partisipasi substantif, di sisi lain, mendorong kolaborasi dan kepercayaan antara warga negara dan otoritas, yang mengarah ke komunitas yang lebih tangguh. Kritik terhadap praktik partisipatif dalam pengelolaan RTH menyoroti perlunya pergeseran dari memandang masyarakat

sebagai tenaga kerja belaka untuk mengakui mereka sebagai mitra kebijakan juga penting. Memahami perbedaan antara partisipasi instrumental dan substantif sangat penting untuk mendorong keterlibatan yang berarti dan memastikan bahwa suara komunitas didengar dan dihargai. Dengan partisipasi substantif, pihak berwenang dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan inisiatif RTH yang pada akhirnya menguntungkan masyarakat dan lingkungan.

C. Kebun Raya Gunung Tidar Sebagai Zona Wisata, Pendidikan, dan Sumber Pendapatan

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat terbagi dalam tiga bagian, yaitu manfaat dari segi material, sosial, dan personal. Partisipasi pada tahap ini menjadi sebuah tolak ukur keberhasilan suatu proyek yang telah disepakati sebelumnya. Partisipasi pada pengambilan manfaat Kebun Raya Gunung Tidar ini masyarakat mendapatkan ketiga dari jenis manfaat tersebut.

1. Masyarakat yang bekerja dan menerima gaji lebih banyak dari adanya Kebun Raya Gunung Tidar.

Dari segi material, masyarakat yang bekerja di kawasan Kebun Raya Gunung Tidar meningkat dibandingkan sebelum adanya alih fungsi. Alhasil masyarakat yang menerima gaji lebih banyak dari adanya Kebun Raya Gunung Tidar. Namun, terkait manfaat secara material yang lainnya teknisi pengelola RTH Kebun Raya Gunung Tidar menegaskan bahwa :

“Kebun Raya Gunung Tidar ini kan merupakan wilayah konservasi yang menjadi wewenang pemerintah Kota Magelang sehingga kalau arahnya masyarakat bisa memanfaatkan secara komersil itu menyalahi aturan. Itu yang perlu digaris bawahi. Misalnya menebang pohon di Kebun Raya Gunung Tidar lalu dijual oleh masyarakat itu tidak boleh. Serta belum ada juga peraturan yang mengatur tentang itu, dan gaada yang saklek secara materiil. Semisal pinus bisa dideres itu berdampak langsung ke masyarakat itu enggak.” (wawancara pada Teknisi Pengelola UPT Kebun Raya Gunung Tidar pada tanggal 6 Februari 2025).

Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa manfaat yang didapatkan secara materiil oleh masyarakat dinilai menyalahi aturan karena RTH Kebun Raya Gunung Tidar ini merupakan wilayah konservasi.

Namun, Karyawan yang menerima gaji kompetitif seringkali lebih termotivasi dan puas dengan pekerjaan mereka. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan kualitas layanan di kebun raya, karena pekerja yang diberi kompensasi baik cenderung lebih terlibat dan berkomitmen pada peran mereka. Pengalaman pengunjung yang ditingkatkan dapat menarik lebih banyak wisatawan dan penduduk setempat ke taman, semakin meningkatkan signifikansinya sebagai ruang publik. Ketika karyawan berprestasi lebih, mereka cenderung menghabiskan lebih banyak untuk barang dan jasa di masyarakat, menguntungkan bisnis lokal dan berkontribusi pada ekonomi yang dinamis. Kegiatan ekonomi ini dapat meningkatkan keuangan secara keseluruhan dari daerah sekitar kebun raya. Keterlibatan mereka dapat meningkatkan peran taman sebagai pusat pembelajaran dan keterlibatan masyarakat, menumbuhkan budaya keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan. Kesimpulannya, kehadiran individu yang bekerja di Kebun Raya Gunung Tidar dan menerima gaji yang lebih tinggi dapat secara signifikan menguntungkan masyarakat. Manfaat ini termasuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas layanan, pengembangan masyarakat, daya tarik bakat, kesetaraan sosial, dan dukungan untuk inisiatif lokal. Dengan mengakui dan meningkatkan nilai para pekerja ini, kebun raya dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan memperkaya masyarakat.

2. Kebun Raya sebagai sarana olahraga, wisata, dan pendidikan

Adanya RTH Kebun Raya Gunung Tidar juga memberikan manfaat sosial bagi masyarakat sekitar kawasan. Masyarakat maupun pengunjung seringkali memanfaatkan area Kebun Raya untuk kegiatan senam bersama. Senam ini biasanya memanfaatkan area yang memiliki tempat yang cukup luas. Disamping itu, karena Kebun Raya Gunung Tidar menjalankan 5 (lima) fungsi yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 83 Tahun 2023 sebagai konservasi,

penelitian, pendidikan, wisata dan jasa lingkungan. Pemanfaatan dalam bidang pendidikan sering kali digunakan untuk kunjungan siswa-siswi dari TK, SD, SMP, hingga SMA. Biasanya, para siswa yang berkunjung didampingi oleh guru mereka untuk edukasi lingkungan alam serta bermain. Fasilitas RTH Kebun Raya Gunung Tidar yang mendukung menjadikan Kebun Raya ini sering dikunjungi bahkan sebagai objek penelitian mahasiswa dari berbagai daerah. Mahasiswa di area Kota Magelang juga beberapa ada yang magang di UPT Kebun Raya. Selain itu, RTH Kebun Raya Gunung Tidar yang terkenal dengan wisata religinya, tidak kalah menarik. Banyak pengunjung yang datang dari luar kota hanya untuk berwisata atau berziarah ke makam yang ada dipuncak Kebun Raya Gunung Tidar. Makam yang ada di Kebun Raya Gunung Tidar diantaranya makam Syekh Subakir, Kyai Sepanjang, dan Mbah Semar. Biasanya, pengunjung didominasi oleh peziarah sebelum bulan puasa atau hari-hari tertentu sesuai dengan kalender hijriah. Hal ini disampaikan langsung saat wawancara oleh salah satu dari beberapa rombongan peziarah:

“Saya pertama kali kesini sama rombongan ber 25 orang dari imogiri jogja untuk ziarah, dari fasilitas tempat untuk istirahatnya perpos udah adem layak, ada mushola, wc tapi sayangnya belum banyak kran-kran untuk cuci tangan disepanjang jalan ini selebihnya udah memadai. Kalau selayaknya hutan udah bersih sih ini.” (wawancara kepada pengunjung pada tanggal 16 Februari 2025).

Selain dimanfaatkan sebagai sarana edukasi lingkungan dan wisata religi, masyarakat ataupun pengunjung RTH Kebun Raya Gunung Tidar sering memanfaatkan sebagai sarana olahraga. Pengunjung atau masyarakat sekitar berolahraga saat sore hari atau pagi hari sekaligus berwisata atau hanya bersantai. Hal ini disampaikan oleh salah satu pengunjung yang sedang berolahraga, beliau mengatakan bahwa :

“Saya udah lumayan sering buat olahraga disini, biasanya saya olahraga kalau ga pagi hari ya sore, tergantung cuaca juga mbak. Soalnya disini enak aja adem buat tracking olahraga. Sekaligus bisa liat sunset kalo dipagi hari.” (wawancara kepada pengunjung pada tanggal 16 Februari 2025)

Dari wawancara diatas, pengunjung merasa nyaman ketika berolahraga di Kebun Raya Gunung Tidar. Mereka memanfaatkan ruang publik yang telah disediakan oleh pemerintah kota magelang.

Pengunjung yang hanya sekedar berwisata, spot yang paling digemari pengunjung saat wisata yaitu Gardu Pandang Taman Elang yang dapat menyaksikan matahari terbit karena wisatawan dapat melihat matahari muncul diantara celah Gunung Merapi dan Gunung Merbabu dengan posisi sejajar mata memandang. Selain masyarakat disekitar kawasan yang beraktivitas di RTH Kebun Raya Gunung Tidar, wisatawan dari mancanegara bahkan ada yang datang lebih pagi hanya untuk menikmati matahari terbit.

3. Adanya masyarakat yang berjualan di Kawasan Kebun Raya Gunung Tidar

Selain adanya manfaat material dan sosial yang diperoleh masyarakat dari adanya RTH Kebun Raya Gunung Tidar, terdapat beberapa manfaat personal yang diterima oleh masyarakat. Hal ini dirasakan lebih individu oleh masyarakat daripada kolektif. Manfaat personal yang didapatkan antara lain pengambilan ranting pohon yang jatuh ataupun rumput-rumput liar sampai saat ini masih dimanfaatkan sebagian besar oleh masyarakat terutama masyarakat RW 12. Selain itu, terdapat pedagang yang berjualan disekitar kawasan Kebun Raya Gunung Tidar. Masyarakat juga berdagang didalam kawasan Kebun Raya, dan sampai saat ini terdapat 4 (empat) titik warung disetiap posnya. Hal ini tentunya memberikan dampak yang baik bagi UMKM sekitar. Hal ini disampaikan oleh salah satu pedagang di Kawasan Kebun Raya Gunung Tidar. beliau menyampaikan bahwa :

“Saya sudah lama berjualan disini, sebelum adanya peralihan dari Hutan Kota menjadi Kebun Raya. Masih ada 3 warung lainnya yang ada disetiap pos juga sudah lama semua jualan disini. Ya lumayan mbak pendapatannya apalagi kalau emang ada acara budaya atau hari-hari libur. (wawancara kepada pedagang mbk ayuk pada tanggal 16 Februari 2025)

Selain adanya pedagang, masyarakat yang bersinggungan langsung dengan pintu masuk Kebun Raya Gunung Tidar juga memanfaatkan sebagian lahannya

untuk dijadikan tempat parkir. Hal ini disampaikan langsung oleh bapak parkir, beliau menyampaikan bahwa :

“Ya lumayan mbak, buat nambah-nambah pendapatan. Apalagi kalau lagi ramai yang liburan atau ada acara keagamaan. Biasanya orang yang nyater-nyater gitu juga lumayan lah.” (wawancara kepada bapak parkir pada tanggal 16 Februari 2025)

Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat memanfaatkan Kebun Raya untuk area berjualan dan sebagian lahannya untuk dijadikan tempat parkir. Apalagi ketika setiap hari sabtu dan minggu ketika pengunjung sedang ramai, pendapatan yang didapatkan dari hasil parkir dan berjualan juga cukup menjanjikan.

Manfaat dari adanya alih fungsi Gunung Tidar menjadi Kebun Raya, tidak hanya didapatkan oleh masyarakat yang tinggal disekitar kawasan saja. Namun, berdampak bagi angkutan umum. Hal ini didapatkan adanya testimoni oleh supir angkutan umum yang berada disekitar kawasan Kebun Raya Gunung Tidar yang mengatakan bahwa:

“Mungkin kalau dulu belum ada Kebun Raya siswa siswi dari sekolah mungkin tidak sebanyak sekarang ya. Tapi dengan Kebun Raya ini kan sekolah memanfaatkannya angkot sekarang, seperti nyater angkot lah buat kesini gitu”. (wawancara kepada supir angkutan umum pada tanggal 16 Februari 2025)

Dari hasil wawancara diatas dengan salah satu supir angkutan umum menunjukkan bahwa saat ini pengambilan manfaat tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal disekitar kawasan saja, melainkan masyarakat diluar kawasan juga mendapatkan dampak atau manfaat dari adanya RTH Kebun raya Gunung Tidar. Hal ini karena Kebun Raya merupakan tempat umum yang dapat diakses dan dirasakan manfaatnya bagi semua orang. Pengunjung serta masyarakat dapat memanfaatkan RTH Kebun Raya Gunung Tidar untuk melakukan berbagai aktivitas atau kegiatan mereka.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis pada tahap pengambilan manfaat sesuai dengan teori partisipasi masyarakat Cohen & Uphoff (1980),

penulis menyimpulkan bahwa manfaat material yang didapatkan yaitu masyarakat lebih banyak yang bekerja di Kebun Raya setelah alih fungsi, alhasil masyarakat yang memperoleh gaji lebih banyak. Pengambilan manfaat sosial masyarakat dapat melakukan aktivitas seperti berolahraga atau senam bersama. Selain itu, Kebun Raya dapat dimanfaatkan sebagai edukasi lingkungan atau wisata religi. Apabila pengunjung banyak yang berdatangan, berdampak bagi UMKM warga sekitar yang berjualan ataupun parkir. Hal ini menjadi bermanfaat dari sisi personal masyarakat. Namun, menurut Cohen & Uphoff (1980) selain menilai dari partisipasi masyarakat dalam manfaat, perlu diperhitungkan konsekuensi yang merugikan dalam partisipasi ini. Status sosial ekonomi secara signifikan mempengaruhi bentuk dan tingkat partisipasi warga negara. Individu dari latar belakang sosial ekonomi yang lebih tinggi sering memiliki akses yang lebih besar ke sumber daya, pendidikan, dan jaringan yang memfasilitasi keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Mereka lebih cenderung terlibat dalam partisipasi substantif, di mana suara mereka didengar dan dihargai dalam membentuk kebijakan. Banyak individu dalam kelompok sosial ekonomi yang lebih rendah bekerja di banyak pekerjaan atau memiliki tanggung jawab keluarga yang menuntut, membuat mereka memiliki sedikit waktu untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat atau diskusi kebijakan.

D. Evaluasi Rutin Tim Monev dalam Pengelolaan RTH Kebun Raya Gunung Tidar yang Berkelanjutan

Menurut Cohen & Uphoff (1980) partisipasi masyarakat dalam evaluasi merupakan tahap terakhir dalam proses partisipasi masyarakat. Evaluasi program dapat dilakukan dengan evaluasi secara langsung dan tidak langsung. Evaluasi ini dapat terjadi secara aktual yang berpusat pada program. Apabila didalamnya terdapat proses peninjauan formal, maka evaluasi yang dilakukan dengan mengetahui siapa yang berpartisipasi, bagaimana keberlanjutannya, dan aksi apalagi yang selanjutnya akan dilakukan berdasarkan evaluasi tersebut. Evaluasi dalam partisipasi masyarakat pada pengelolaan RTH Kebun Raya Gunung Tidar, dilakukan secara langsung dengan formal melalui forum

monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Forum ini dilaksanakan setiap bulan satu kali atau dalam satu tahun terjadi selama 12 pertemuan.

Evaluasi dalam pengelolaan RTH Kebun Raya Gunung Tidar banyak melibatkan berbagai unsur. Pihak yang terlibat juga memiliki perannya masing-masing. Dengan demikian, pengelolaan RTH Kebun Raya Gunung Tidar tidak hanya berpusat pada elit tertentu saja, tetapi melibatkan berbagai lapisan. Dengan hal ini, supaya evaluasi tidak semata-mata hanya tanggungjawab pemerintah saja. Sinergi pemangku kepentingan juga penting dalam mengembangkan RTH Kebun Raya Gunung Tidar. Dengan kolaborasi menjadi krusial untuk keberhasilan pengelolaan. Elemen kunci dari kolaborasi yang efektif salah satunya partisipasi. Dengan adanya kepercayaan antar sesama, komitmen, serta tujuan bersama dapat menjadikan kolaborasi yang efektif. Pada tabel berikut menunjukkan berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan RTH Kebun Raya Gunung Tidar pada tahap evaluasi dalam forum monev (monitoring, evaluasi, dan pelaporan) :

Tabel 6 Pemangku Kepentingan dalam Evaluasi Pengelolaan RTH Kebun Raya Gunung Tidar

No	Institusi
1.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
2.	UPT Kebun Raya Gunung Tidar
3.	Kelurahan Magersari
4.	Salpol PP Kota Magelang
5.	BPBD Kota Magelang
6.	Akademi Militer
7.	Kepolisian, Kapolsek, Koramil
8.	Ketua RW 6,7,10,12

Sumber : Wawancara pada Teknisi Pengelola UPT Kebun Raya Gunung Tidar, diolah oleh penulis

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi pengelolaan RTH Kebun Raya Gunung Tidar ini mewadahi setiap elemen untuk menyampaikan aspirasi, tujuan yang hendak dicapai ataupun hambatan yang menjadi masalah dalam berjalannya

pengelolaan RTH Kebun Raya Gunung Tidar. Adanya evaluasi ini dapat meningkatkan efektifitas dari kebijakan-kebijakan RTH Kebun Raya Gunung Tidar yang telah diberlakukan dengan memperhatikan masyarakat untuk penyesuaian peraturan kedepannya. Partisipasi dalam evaluasi dapat menciptakan kolaborasi ataupun keputusan yang lebih inklusif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Apabila keputusan dalam pengelolaan RTH Kebun Raya Gunung Tidar disesuaikan dengan preferensi masyarakat, hal ini menjadikan kondisi lingkungan yang lebih baik dan bermanfaat untuk masyarakat yang tinggal dikawasan maupun luar kawasan. Optimalisasi kualitas RTH dengan perbaikan birokrasi didalamnya, akan menciptakan tata kelola yang responsif. Selain itu, evaluasi yang berkelanjutan dalam pengelolaan RTH ini dapat menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ataupun hambatan dalam mengelola RTH Kebun Raya Gunung Tidar. Oleh karena itu, pertemuan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan pengelolaan dapat membangun kepercayaan untuk tindakan kolektif dalam evaluasi dapat mengarah pada solusi lingkungan RTH Kebun Raya Gunung Tidar yang inovatif. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ketua RW 6 selaku perwakilan dari masyarakat, beliau mengatakan :

“Kita ada tim monev berkumpul setiap 1 bulan sekali di kantor UPT Kebun Raya, dan kita menjaring ada usulan apa dari tiap-tiap RW atau dari UPT Kebun Raya. Ketika ada kendala apa disekitar kawasan dan jika ada masalah atau keiinginan apa maka kita pecahkan di rapat tim monev itu.”

(wawancara kepada Ketua RW 6 pada tanggal 12 Februari 2025).

Selain itu, terdapat beberapa masukan dari masyarakat dikawasan penyanggah atau yang bersinggungan langsung dengan Kebun Raya Gunung Tidar. Hal ini disampaikan melalui Ketua RW 10 :

“Iya kadang ada yang kasih masukan seperti pohon yang ada didalam Kebun Raya Gunung Tidar itu melengkung ke jalan, nah nanti saya menyampaikan ke dalam tim monev itu, nanti dari UPT Gunung Tidar langsung menindak lanjuti”. (wawancara kepada Ketua RW 10 pada tanggal 12 Februari 2025).

Dibalik dari adanya ketua RW, tentu terdapat peran dari pihak kelurahan, yaitu kelurahan magersari. Beliau menyampaikan bahwa :

“Kalau kami dari pihak kelurahan, biasanya yang datang dari bu lurah atau perwakilan dari saya. Kita ya sebagai pemangku wilayah aja mbak pemberitahuan kegiatan di kelurahan, kolaborasi kalau disini kebun raya ada kegiatan, dan saran masukan aja buat kebun raya” ”. (wawancara kepada kasi trantib kelurahan magersari).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pengelolaan RTH Kebun Raya melibatkan elemen masyarakat serta pemerintah yang dihadiri secara langsung. Dengan adanya pertemuan ini, ketua RW maupun pihak lurah dapat dengan mudah menyampaikan seluruh keluhan ataupun masukan dari masyarakat setempat.

Figure 6 Kondisi Rapat evaluasi di UPT Kebun Raya Gunung Tidar



Sumber : Dokumentasi UPT Kebun Raya Gunung Tidar

Gambar diatas merupakan kondisi pada saat rapat monev yang dilaksanakan setiap bulan satu kali. Rapat tersebut dihadiri dari berbagai elemen yang terlibat dalam pengelolaan RTH Kebun Raya Gunung Tidar. Partisipasi dalam hal ini merupakan penilaian ataupun opini dari program yang sudah berjalan. Hal ini

bertujuan untuk mengetahui apakah program tersebut sudah sesuai dengan tujuan yang dicapai atau belum, sehingga dapat mengetahui terkait kendala-kendala yang menghambat pada pengelolaan RTH Kebun Raya Gunung Tidar. Selain itu, partisipasi dalam evaluasi ini dapat menjadi pembahasan terkait keberlanjutan atau aksi yang akan dilakukan pada program selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi ini. Partisipasi dalam rapat monev harus selalu melibatkan adanya keterwakilan dari masyarakat. Hal ini dirasa penting karena apabila tidak dilibatkan, berjalannya pengelolaan RTH Kebun Raya Gunung Tidar akan dijalankan dan dimanfaatkan oleh elit tertentu dan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis pada tahap evaluasi sesuai dengan teori partisipasi masyarakat Cohen & Uphoff (1980), penulis menyimpulkan bahwa masyarakat memiliki peran aktif dalam mengevaluasi kinerja dari pengelolaan RTH Kebun Raya Gunung Tidar. Adanya partisipasi dari masyarakat dan pemerintah diperlukan untuk menjaga netralitas dari adanya evaluasi tersebut. Hal ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh (Cohen,1980) bahwasannya partisipasi masyarakat sangat penting dalam memberikan nilai serta mengevaluasi hasil dari perencanaan. Masyarakat dapat memberikan kritik dan saran terkait pelaksanaan pemerintah supaya sejalan dengan apa yang sudah direncanakan dan mencapai hasil yang sesuai dengan prioritas lokal.

BAB V

FAKTOR PENDUKUNG DAN FAKTOR PENGHAMBAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN RTH KEBUN RAYA GUNUNG TIDAR KOTA MAGELANG

Partisipasi masyarakat merupakan suatu bentuk keterlibatan masyarakat dikawasan mereka tinggal. Partisipasi biasaya disertai dengan berbagai alasan yang mendorong masyarakat supaya ikut berpartisipasi dalam program. Dalam pengelolaan RTH Kebun Raya Gunung Tidar, masyarakat yang dilibatkan dalam proses perencanaan, implementasi, pengambilan manfaat, dan evaluasi tentunya terdapat faktor yang mendukung mereka untuk turut serta berpartisipasi dan terdapat hal menghambat berjalannya partisipasi masyarakat.

A. Faktor Pendukung Partisipasi Masyarakat

1. Adanya kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk turut serta mengelola RTH Kebun Raya Gunung Tidar

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan program pembangunan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kesempatan berpartisipasi merupakan unsur penting yang mendorong kemauan dan kemampuan masyarakat untuk terlibat (Agusti & Wibawani, 2023). Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan RTH Kebun Raya Gunung Tidar merupakan elemen penting dalam menangani berbagai masalah sosial. Peningkatan kesadaran masyarakat memerlukan upaya kerjasama di antara banyak pemangku kepentingan, termasuk badan pemerintah, tokoh publik yang berpengaruh, dan masyarakat itu sendiri (Anggita Laras Syanlindri & S. Supriyono, 2023; Ester Sarina Purba & S. Yunita, 2017). Dalam pengelolaan RTH Kebun Raya Gunung Tidar, masyarakat menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai makhluk sosial. Kemauan yang identik dengan pengetahuan, sadar, dan tahu yang dapat dinilai dari tingkat pendidikan masyarakat itu sendiri. Hal ini menjadi peluang baik atau tidaknya partisipasi masyarakat. Dengan adanya peralihan Gunung Tidar menjadi Kebun Raya, masyarakat sadar akan lingkungan dan kawasannya akan menjadi lebih baik untuk kedepannya. Hal ini dikarenakan dari segi fasilitas semakin ditingkatkan supaya memberikan ruang yang nyaman dan aman untuk

masyarakat yang berkunjung atau beraktifitas. Masyarakat cenderung memiliki rasa untuk berpartisipasi dari segi tenaga dalam setiap program atau kegiatan tertentu di RTH Kebun Raya Gunung Tidar, namun akan lebih efektif lagi apabila ada yang menggerakkan terutama dari masyarakat itu sendiri. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh ketua RW 6 :

“Ya biasanya kalau ada kegiatan tertentu seperti bulan syuro, biasanya banyak kegiatan budaya di Kebun Raya Gunung Tidar. Otomatis kita dari RW kerahkan masyarakat untuk tetap menjaga keamanan, kenyamanan pengunjung supaya tetap berkunjung lagi nantinya” (wawancara kepada Ketua RW 6 pada tanggal 12 Februari 2025).

Dari wawancara diatas menunjukkan bahwa tokoh masyarakat juga memiliki peran penting untuk mengajak masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang ada di Kebun Raya. Dengan adanya tokoh masyarakat yang membantu atau terlibat dalam pengelolaan RTH Kebun Raya Gunung Tidar, menjadikan masyarakat yang sebelumnya pasif terhadap kegiatan-kegiatan di kawasan tidak senggkan untuk berkontribusi dalam kegiatan yang diadakan. Hal ini dikarenakan untuk meningkatkan partisipasi, penting untuk melibatkan seluruh anggota masyarakat dalam setiap aktivitas pengelolaan dan memberikan kepercayaan kepada mereka (Tanjung et al., 2017)

Pemerintah melalui DLH UPT kebun Raya Gunung Tidar sebagai pemangku kepentingan harus memberikan nilai moril yang dapat membangkitkan semangat dan kesadaran masyarakat yang ada disekitaran kawasan untuk senantiasa menjaga dan membantu dalam hal pengelolaan RTH Kebun Raya Gunung Tidar. Sehingga kedepannya dalam pemerintah dan masyarakat dikawasan Kebun Raya dapat tercipta adanya sinergitas yang kedepannya dapat sama-sama mengelola Kebun Raya. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat bukan suatu yang datang secara mendadak. Karena peran UPT Kebun Raya Gunung Tidar sangat penting dalam menjaga dan meningkatkan kesadaran masyarakat supaya dapat bekerjasama dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak yang harus terjalin dengan baik.

Sehingga, menciptakan lingkungan yang baik dan berpengaruh terhadap program-program yang nantinya akan dilaksanakan bersama-sama dalam partisipasi pengelolaan RTH Kebun Raya Gunung Tidar. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Teknisi UPT Kebun Raya Gunung Tidar :

“Pasti komunikasi juga menjadi hal yang utama, jadi kita perlu komunikasi dan koordinasi dan kita jadi UPT Kebun Raya Gunung Tidar juga perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana wisata budaya dan dipadukan dengan statusnya Kebun Raya harus selaras dan berjalan berdampingan dan tidak bisa mementingkan salah satu, nah itu kita juga perlu memberikan pemahaman lebih.” (wawancara pada Teknisi Pengelola UPT Kebun Raya Gunung Tidar pada tanggal 6 Februari 2025).

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis, partisipasi dalam hal ini menunjukkan bahwasanya keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan RTH Kebun Raya Gunung Tidar terdapat rasa kepedulian dan kesadaran dari masyarakat terhadap kondisi di lingkungan sekitar. Alhasil mendorong masyarakat agar berpartisipasi dalam pengembangan RTH Kebun Raya Gunung Tidar. Selain itu, dari adanya peran tokoh masyarakat juga memicu warga untuk terdorong rasa turut berpartisipasi, hal ini karena mereka cenderung berpartisipasi apabila terdapat masyarakat yang turut mengajaknya.

2. Partisipasi memberikan keuntungan bagi masyarakat

Partisipasi dalam pengelolaan RTH Kebun Raya Gunung Tidar semestinya memberikan dampak yang baik bagi masyarakat, baik dari segi sosial, estetis, dan dari segi ekonomi. Pada aspek sosial, RTH Kebun Raya Gunung Tidar menyediakan sarana dan prasarana untuk ruang berinteraksi masyarakat, ruang bersantai seperti hanya duduk ditaman untuk melepas penat dan sebagai sarana rekreasi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih menyukai RTH yang teduh, berfungsi sebagai paru-paru kota, dan berfungsi sebagai pusat interaksi dan komunikasi sosial. Untuk memaksimalkan fungsinya sebagai RTH, Kebun Raya Gunung Tidar merencanakan dengan model secara efektif yang mencakup fasilitas umum, taman bermain, area tempat duduk, area khusus pedagang, parkir yang aman, pengelolaan sampah yang tepat, pencahayaan

yang sesuai, dan pemilihan jenis tanaman berdasarkan kondisi setempat. Pada aspek estetis, ruang terbuka hijau memberikan nilai keindahan. Seperti yang dilakukan di Kebun Raya Gunung Tidar, menunjukkan bahwa taman yang menarik dapat meningkatkan kunjungan masyarakat. Namun, untuk mencapai RTH yang fungsional dan estetis, perlu mempertimbangkan beberapa hal salah satunya dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas RTH Publik. Oleh karena itu, diperlukan ruang terbuka hijau publik yang dirancang dan dirawat dengan baik yang menyeimbangkan manfaat ekologis dengan daya tarik estetika untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi masyarakat.

Pada aspek ekonomis, RTH Kebun Raya Gunung Tidar dapat memberikan nilai ekonomi kawasan tersebut apabila dikelola dengan baik. RTH dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM, meningkatkan pendapatan warga, dan memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah. Penulis menemukan dari 3 titik warung-warung yang berjualan didalam kawasan Kebun Raya tidak pernah sepi pelanggan. Hal tersebut disebabkan karena melonjaknya jumlah wisatawan dari berbagai daerah, baik dari lingkup Kota Magelang, ataupun dari luar Kota Magelang. Menurut salah satu tukang parkir yang ada disekitar kawasan, beliau mengatakan :

“Biasanya kalau lagi rampai di Kebun Raya Gunung Tidar ini sampai parkiran nggak muat mbak, pernah parkiran sampai artos saking ramainya dan tangga jalan menuju puncak ini udah kayak semut” (wawancara kepada tukang parkir, 16 Februari 2025)

Dari wawancara diatas menunjukkan respon positif dari masyarakat, bahwasanya dengan adanya RTH Kebun Raya ini menjadi peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan. Selain itu, rata-rata dari mereka merasakan perubahan baik dalam segi pendapatan dari sebelum dan sesudah menjadi RTH Kebun Raya Gunung Tidar. Salah satu pedagang yang berada diluar kawasan Kebun Raya beliau menyampaikan bahwasannya :

“Saya sebelumnya bekerja di dinas pendidikan, namun karena sekarang lagi ada waktu saja juga sambil berjualan disini, lumayan bisa nambah

penghasilan” (wawancara kepada pedagang bakso pak didi, 16 Februari 2025)

Hal ini menjadi salah satu faktor masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan RTH Kebun Raya Gunung Tidar karena adanya peluang ekonomi yang cukup besar. Salah satu faktor partisipasi masyarakat juga karena alasan ekonomi. Dari adanya kerjasama dari pemerintah dan masyarakat pengelolaan RTH Kebun Gunung Tidar ini memberikan penghasilan kepada mereka. Hal tersebut menjadi selaras bahwasannya masyarakat akan turut berpartisipasi apabila membawa kebermanfaatan bagi masyarakat secara materiil. Namun tidak semua masyarakat yang tinggal di kawasan Kebun Raya Gunung Tidar dapat memanfaatkan peluang ini.

B. Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat

1. Adanya proses pengambilan keputusan sepihak dari UPT Kebun Raya Gunung Tidar

Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan merupakan aspek penting dalam membangun demokrasi yang lebih baik. Partisipasi masyarakat harus diadakan sebagai kesempatan bagi seluruh warga untuk menyampaikan aspirasi secara argumentatif, bukan hanya sebagai formalitas (Mariana, 2017). Dari adanya proses partisipasi yang harus menjamin kontrol masyarakat, yang berarti usulan dan saran dari masyarakat setidaknya harus dipertimbangkan walaupun keputusan nantinya tidak sepenuhnya dipenuhi. Hal ini sesuai dengan keputusan tentang kenaikan harga tiket pengunjung RTH Kebun Raya Gunung Tidar. Saat ini pengunjung yang ingin berwisata di Kebun Raya ditarif dengan harga tiket sebesar Rp.5.000 yang sebelumnya harganya Rp.3000. Namun, pengunjung yang dikenakan biaya tiket hanya berlaku untuk pengunjung yang berada di wilayah luar kawasan atau berkunjung dalam skala besar. Untuk masyarakat sekitar atau yang hanya ingin berolahraga tidak dipungut biaya untuk memanfaatkan fasilitas di RTH Kebun Raya Gunung Tidar. Menurut UPT pengelola RTH Kebun Raya Gunung Tidar, hal ini menjadi hal yang harus dihimbau kepada masyarakat karena awalnya kenaikan tarif tiket ini hanya sebagai uji coba. Namun, sampai saat ini kebijakan kenaikan harga

tiket masih berlaku. Beberapa pengunjung menilai kebijakan ini tidak menjadi masalah bagi mereka. Hal ini disampaikan langsung oleh pengunjung RTH Kebun Raya Gunung Tidar :

“Menurut saya sebagai yang pertama kali kesini tidak terlalu masalah dan masih cukup terjangkau untuk harga tiket Rp. 5.000. Karena kita kesini juga ramai-ramai”. (Wawancara kepada pengunjung pada tanggal 16 Februari 2025)

Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwasanya pengunjung merasa tidak keberatan dengan harga tiket yang sudah ditentukan. Namun, kenaikan harga tiket ini masih menjadi masalah bagi beberapa pengunjung. Hal ini secara langsung disampaikan oleh tukang parkir di Kebun Raya, beliau menyampaikan bahwa :

“Waktu itu sempat ada beberapa rombongan bus pengunjung yang mau kesini, tapi sampai parkir ada yang putar balik lagi karena harga tiket yang awalnya mereka tau Rp.3.000 sekarang jadi Rp.5.000. Ya mungkin karena udah iuran untuk biayanya ya, tapi sebenarnya kalo dalam jumlah besar datang ya bisa dinego lah untuk tiket. Tapi Cuma waktu itu, kalau sekarang kebanyakan pengunjung sudah tau harga tiketnya Ro. 5.000, walaupun belum sepenuhnya. ” (Wawancara kepada tukang parkir pada tanggal 16 Februari 2025)

Dalam wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwasanya kenaikan harga tiket ini tidak menjadi masalah bagi beberapa kalangan, namun dari pengelola Kebun Raya Gunung Tidar termasuk penjaga loket perlu adanya himbauan bagi para pengunjung. Kenaikan harga tiket ini dinilai dapat mempengaruhi jumlah pengunjung dan omset penjualan. Dari 3 (tiga) titik area jualan yang berada didalam Kawasan Kebun Raya Gunung Tidar, salah satu pedagang menyampaikan bahwa :

“Kalau pengunjung faktornya dari harga tiket masuk, dulu pertama itu seikhlasnya, lalu menjadi Rp. 3.000 itu masih ramai, dan mulai harga Rp. 5.000 lumayan agak sepi. Apalagi bulan sebelum puasa ini tuh sudah ramai banget kayak semut jalannya. Setahune saya ya, waktu itu udah ketok palu

tiket udah Rp. 5.000 dan udah ada surat edarannya gitu baru tau masyarakat. Dulunya sih bilangnye uji coba, tapi sampai sekarang juga masih tetap.” (Wawancara kepada pedagang pada tanggal 16 Februari 2025)

Dari wawancara diatas, pengunjung merasa bahwa kenaikan harga tiket ini juga menjadi hal yang mempengaruhi pengunjung. Selain itu, keputusan kenaikan harga tiket dari Rp.3.000 menjadi Rp. 5.000 juga dinilai keputusan secara sepihak. Hal ini dirasakan langsung oleh para pedagang karena mereka yang besinggungan langsung dengan pengunjung Kebun Raya Gunung Tidar, kadang ada yang mengeluh walaupun tidak semua pengunjung demikian.

Partisipasi masyarakat, merupakan hal yang krusial terutama keputusan dari adanya harga tiket ini. Adanya partisipasi dalam pengelolaan RTH dengan melibatkan masyarakat, seharusnya diberikan ruang untuk hal-hal yang akan diputuskan dengan kesepakatan bersama. UPT Kebun Raya Gunung Tidar memutuskan kenaikan harga tiket ini karena disesuaikan dengan adanya penambahan beberapa fasilitas yang ditawarkan oleh pengunjung. Oleh karena itu, kenaikan ini terdapat arahan dari pimpinan UPT Kebun Raya untuk menaikkan harga tiket Rp. 3.000 menjadi Rp. 5.000. Fasilitas ini seperti perlunya adanya tenaga kesehatan yang menjadi peran cukup penting dalam penanganan kepada pengunjung yang sakit, pingsan dll. Namun, adanya keputusan kenaikan harga tiket yang berdampak kepada masyarakat juga perlu adanya melibatkan seluruh elemen pengelolaan RTH Kebun Raya Gunung Tidar, bukan hanya keputusan sepihak. Walaupun hal ini menjadi uji coba, namun sampai sekarang masih berlaku. Beberapa pengunjung tidak keberatan akan hal ini, namun beberapa pedagang dikawasan RTH Kebun Raya menilai pengunjung tidak sebanyak pada saat tiket masih di harga Rp. 3.000 walaupun pengunjung saat ini masih dikategorikan cukup ramai dan tidak sepi pengunjung. Oleh karena itu UPT Kebun Raya Gunung Tidar harus lebih mempertimbangkan plus dan minusnya kenaikan harga tiket untuk uji coba ini serta untuk kedepannya apapun keputusan yang akan dibuat untuk kepentingan masyarakat harus disepakati bersama supaya tidak adanya pihak yang dirugikan dalam keputusan tersebut.

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kebun Raya Gunung Tidar mengungkapkan hubungan kekuasaan yang rumit antara pemerintah dan komunitas elit setempat. Analisis ini berfokus pada bagaimana dinamika ini membentuk proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Komunitas elit lokal sering memegang pengaruh signifikan atas keputusan pemerintah mengenai pengelolaan RTH. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan dapat didominasi oleh kepentingan elit politik, yang mungkin tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Ini menciptakan skenario di mana suara elit lokal diperkuat, berpotensi mengesampingkan kepentingan anggota komunitas yang kurang kuat. Pemerintah dapat mengandalkan elit lokal untuk dukungan dalam menerapkan kebijakan dan mengumpulkan penerimaan masyarakat. Ketergantungan ini dapat menyebabkan situasi di mana pemerintah memprioritaskan preferensi elit ini di atas kepentingan kolektif masyarakat.

Pengelolaan RTH di Kebun Raya Gunung Tidar ini menyoroti bahwa keputusan yang dibuat oleh pemerintah terkadang mencerminkan kepentingan elit, yang dapat mengakibatkan kebijakan yang tidak memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Interaksi antara pemerintah dan komunitas elit lokal memiliki implikasi signifikan bagi pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Jika kebijakan terutama dibentuk oleh kepentingan elit, manajemen RTH yang dihasilkan mungkin tidak mendukung tujuan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Aspek kritis memprioritaskan kepentingan elit politik daripada kebutuhan asli masyarakat, dapat dikatakan sebagai partisipasi semu atau tokenism. Agar partisipasi masyarakat melampaui tokenisme, harus ada kemauan politik yang tulus untuk menciptakan ruang inklusif di mana suara komunitas dihargai dan ditindaklanjuti. Hal ini menekankan bahwa tanpa komitmen ini, partisipasi mengarah pada kebijakan yang tidak mencerminkan kepentingan kolektif masyarakat. Partisipasi disusun dan dilaksanakan untuk memastikan bahwa itu bermakna dan berdampak. Ini menekankan bahwa anggota komunitas diundang untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan RTH, keterlibatan

mereka seringkali dangkal. Tokenisme ini bermanifestasi ketika masukan komunitas diminta tetapi tidak benar-benar dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Hal ini mengungkapkan bahwa keputusan sering mencerminkan kepentingan elit politik daripada kebutuhan masyarakat, menunjukkan kurangnya keterlibatan otentik.

2. Adanya masyarakat yang disibukkan oleh pekerjaan profesionalnya sehingga membatasi keterlibatan partisipasi dalam pengelolaan RTH

Partisipasi masyarakat merupakan aspek yang esensial dalam program pembangunan dan pemberdayaan komunitas. Keterlibatan aktif dari masyarakat juga dapat meningkatkan efektivitas serta rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sosial. Namun, sering terjadi hal yang tidak sesuai antara proses partisipasi masyarakat dengan kondisi masyarakat yang mengakibatkan kurang adanya kepercayaan dan keterlibatan masyarakat. Partisipasi masyarakat terutama perempuan juga memiliki peluang untuk berperan penting dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan. Namun, hal ini sering terkendala oleh kurangnya kesadaran dan konflik antar masyarakat. Hal ini disampaikan oleh ketua RW 7. Beliau menyampaikan bahwa :

“Kalau masyarakat di rw 7 ya mbak, beberapa masyarakat memang fokus dengan pekerjaan mereka. Walaupun ketika nanti ada acara di Kebun raya kita tetep berpartisipasi. Tapi kalau masukan dan lainnya nantinya lewat ke saya aja biar langsung disampaikan ke monev”
(wawancara kepada Ketua RW 7 pada tanggal 12 Februari 2025).

Selain dari ketua RW 7, dari Ketua RW 12 juga mengkonfirmasi hal demikian. Beliau menyampaikan bahwa :

“masyarakat di RW 12 ya mbak, apalagi ini di kota magelang. mereka biasanya bekerja kebanyakan di dinas-dinas atau lainnya. Tapi kadang ada juga yang sambilan kerja di kebun raya. Memanfaatkan peluang kalau sekiranya lagi ramai. Kalau tentang kepedulian mereka juga kita sama-sama jaga kebun raya supaya bisa lebih baik buat kedepannya.”
(wawancara kepada Ketua RW 12 pada tanggal 12 Februari 2025).

Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwasannya masyarakat disibukkan oleh pekerjaan pribadinya. Oleh karena itu, diperlukan adanya pendekatan yang tepat antara pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan RTH di Kebun Raya Gunung Tidar. Dalam partisipasi ini, tidak seluruh masyarakat yang berada dikawasan Kebun Raya terlibat dalam pengelolaan RTH. Hal ini dikarenakan beberapa masyarakat yang memiliki kesibukan pribadi sehingga kurang memiliki waktu yang cukup untuk turut terlibat aktif dalam pengelolaan RTH.

Tidak seluruh masyarakat dapat memanfaatkan peluang yang ada, sehingga beberapa masyarakat juga terlalu disibukkan oleh pekerjaan profesionalnya sehingga tidak lagi memiliki kapasitas untuk ikut terlibat aktif dalam mengelola RTH. Selain itu, di Kebun Raya Gunung Tidar sudah terdapat pekerja tetap yang notabennya bekerja untuk mengelola dan merawat RTH Kebun Raya Gunung Tidar. Sehingga, keterlibatan masyarakat hanya sebatas acara-acara budaya yang dilaksanakan dalam bulan dan hari tertentu. Partisipasi dalam hal ini, supaya masyarakat terbiasa dan bertanggungjawab atas kondisi yang ada di sekitar lingkungannya. Maka dari itu, perlu adanya kesadaran di masyarakat akan tanggung jawab terhadap kondisi sosialnya dan tentunya UPT Kebun Raya Gunung Tidar untuk merubah pola pikir masyarakat untuk peduli.

Partisipasi sangat berperan penting dalam pembangunan berkelanjutan. Namun, tantangan juga tetap ada dalam mencapai partisipasi yang baik. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan RTH ini masih terbatas dalam penerimaan informasi tanpa kesempatan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Partisipasi yang efektif juga memerlukan kapasitas dari kepemimpinan dalam membangun komunikasi dua arah yang baik. Dalam mengatasi hambatan seperti pemahaman yang terbatas tentang pentingnya partisipasi, perspektif yang berbeda, serta kendala sumber daya pemerintah perlu memperkuat koordinasi dengan masyarakat memastikan bahwa transparansi dalam pengelolaan RTH Kebun Raya Gunung Tidar. Upaya ini

juga dapat meningkatkan efektivitas program sosial dan mendorong tanggung jawab bersama dalam mencapai kesejahteraan kolektif.

Masyarakat yang berada di Kawasan Kebun Raya Gunung Tidar sudah memiliki budaya gotong royong dan kolaborasi masyarakat yang cukup baik, masih juga terdapat beberapa masyarakat yang kurang kolaboratif. Masyarakat dari golongan ini umumnya merupakan masyarakat pendatang yang kurang dalam memahami nilai-nilai dan budaya kolaborasi yang dimiliki masyarakat sekitar kawasan. Hal ini menjadi cukup esensial, karena Kebun Raya Gunung Tidar juga merupakan wisata budaya yang masih memegang nilai-nilai luhur. Ketidaktahuan masyarakat juga menjadi hambatan, karena selain sifat pribadi masyarakat yang individualis terhadap lingkungan sekitar juga menjadi penghambat dari terbentuknya partisipasi masyarakat yang efektif dan efisien. Pengecualian kelompok tertentu dari partisipasi dalam manajemen RTH adalah masalah kritis. Biasanya, komunitas yang terpinggirkan, termasuk keluarga berpenghasilan rendah, etnis minoritas, dan individu dengan pendidikan terbatas, sering kurang terwakili dalam proses partisipatif. Konteks sosiopolitik partisipasi dalam pengelolaan RTH sangat dipengaruhi oleh status sosial ekonomi dan berbagai dimensi eksklusi. Dengan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh masyarakat terpinggirkan dan menumbuhkan lingkungan yang menghargai suara yang beragam, pengelolaan RTH dapat menjadi lebih efektif dan mewakili kebutuhan semua warga negara. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keberlanjutan pembangunan perkotaan tetapi juga mempromosikan kesetaraan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis laksanakan dilapangan, maka jawaban atas pertanyaan terkait proses partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH Kebun Raya Gunung Tidar menghasilkan dua point simpulan. *Pertama*, Partisipasi masyarakat dapat menentukan keberhasilan dalam pengelolaan RTH Kebun Raya Gunung Tidar. Keterlibatan anggota masyarakat dalam kontribusi sumber daya dalam pembangunan fasilitas, Adanya peningkatan partisipasi masyarakat apabila ada insentif ekonomi dan evaluasi mengarah pada peningkatan pengelolaan RTH Kebun Raya. Partisipasi ini memastikan bahwa strategi yang digunakan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab di masyarakat.

Kedua, alasan masyarakat turut berpartisipasi dalam pengelolaan RTH Kebun Raya Gunung Tidar karena adanya kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Pentingnya kesadaran dalam pengelolaan RTH, dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan manajemen kota. Selain itu, Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH cenderung meningkat bila disertai dengan keuntungan ekonomi langsung dan akses ke keputusan publik. Ini mencerminkan temuan penelitian bahwa peluang yang diberikan oleh pemerintah meningkatkan keterlibatan masyarakat, menunjukkan bahwa manfaat nyata dapat memotivasi partisipasi. Sedangkan faktor penghambat Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH sering terhalang oleh dinamika politik yang mendukung kepentingan elit, mengakibatkan terputusnya antara kebutuhan masyarakat dan keputusan kebijakan. Proposisi ini menekankan perlunya proses pengambilan keputusan yang adil untuk memastikan bahwa suara yang terpinggirkan dimasukkan dalam pengelolaan RTH.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan, Studi ini berfokus secara khusus pada Kebun Raya Gunung Tidar di Kota Magelang yang dapat membatasi generalisasi temuan ke daerah lain di Indonesia. Kota yang berbeda memiliki konteks politik, sosial, dan ekonomi yang berbeda pula. Adanya Keterbatasan lingkup penelitian ini membatasi penerapan temuan ke daerah perkotaan lain dengan dinamika sosial yang berbeda. Menganalisis kerangka kebijakan dalam pengelolaan RTH di Kota Magelang dan membandingkannya dengan kota-kota lain dapat menghasilkan wawasan tentang bagaimana kebijakan mempengaruhi partisipasi masyarakat dan alokasi sumber daya.

Dengan mempertimbangkan saran ini peneliti lebih lanjut dapat menggali lebih dalam dinamika politik yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Memahami hubungan antara entitas pemerintah, elit politik, dan anggota komunitas dapat memberikan wawasan tentang bagaimana menavigasi dinamika ini dalam pengelolaan RTH yang lebih efektif. Sehingga mendukung pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup di daerah perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiansyah, J. S., Muladi, A., & Johari, H. I. (2024). *Pemetaan Peran Serta Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan RTH Publik di Kota Mataram dengan Pendekatan Stakeholder Analysis*. 12(1), 424–432.
- Agusti, V. N., & Wibawani, S. (2023). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Kampung Edukasi Sampah*. 5(1), 111–123.
- Allokendek, M. L., Hanny, P., & Lahamendu, V. (2019). *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*. 102–112.
- Andriyani, L. (2023). *Relasi Kuasa Pemerintah Surabaya Dalam Pemenuhan Ruang terbuka Hijau*. 8(1). <https://doi.org/10.14710/jiip>.
- Budi, S., & Akbar, I. (2018). *E-partisipasi dalam pembangunan lokal (studi implementasi*. 8–12.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity. *World Development*, 8(3), 213–235. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(80\)90011-X](https://doi.org/10.1016/0305-750X(80)90011-X)
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih di antara lima data*.
- Ernawati, R. (2025). *Optimalisasi Fungsi Ekologis Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Surabaya*. 1, 60–68.
- Fitrian. (2019). *Sustainable Development Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan Kabupaten Takalar*.
- Fitriyah, N. S., & Purwanto, A. (2020). *Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah oleh Pemerintah Daerah*. 4, 299–316.
- Handayani, P., Nazaruddin, & Nuribadah. (2021). *IMPLEMENTASI RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK (Suatu Tinjauan Berdasarkan Qanun Nomor 7*

- Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen). IV(Oktober), 286–296.*
- Indrajati, E., & Prihadi, S. (2024). *Analisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau (rth) publik di kecamatan jebres kota surakarta tahun 2022*. 02(01), 92–99.
- Irmadella, A. (2018). Model Kolaborasi Stakeholders Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Bungkul Kota Surabaya. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 6(2), 1–11.
- Issa, A. K., Tulis, R. S., Setiawan, F., & Hikmah, N. (2024). *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSRENBANG: ANALISA BERDASARKAN TEORI MOBILISASI SUMBER DAYA COMMUNITY PARTICIPATION IN MUSRENBANG: ANALYSIS BASED ON RESOURCE MOBILIZATION THEORY*. 10, 165–178.
- Jabbarudin, & Hasjad. (2022). *Tinjauan yuridis penataan ruang kawasan pesisir kota kendari terhadap lingkungan hidup*. 1(2), 171–186.
- Kharisma, B. (2018). *The Determinants of Participation in the Social Activities : The Case of Indonesia*. 7(35), 185–200.
- Mahendra, I. M. A. (2022). *Analisi Ruang Terbuka Hijau dalam Perspektif Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi Kasus Kawasan Ousat Kota Denpasar, Bali)*. 5(1), 41–49.
- Mangopa Malik, A. A. (2018). The Role of Stakeholders Related to the Management of Ecological Function of Urban Green Open Space. Case Study: City of Depok, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 99(1), 1–12. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/99/1/012001>
- Mariana, D. (2017). *Partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan*. 1(2), 216–229.
- Mashar, M. F. (2021). *Fungsi Psikologi Ruang Terbuka Hijau*. 2(10).

- Mawaddah, Y., & Anismar. (2022). *Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) terhadap Penataan Lingkungan Kota Lhoksumawe*. 3, 366–377. <https://doi.org/10.29103/jspm.v3i2.5506>
- Maya, D., Siregar, S., Manik, A., Geraldine, R., Ameliya, M., & Ivanna, J. (2024). *Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pengambilan Keputusan Politik*. 2(1), 89–94.
- Moleong, L. J. (2017). *Medote Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Novyandy, M. R. (2019). *Penilaian fungsi ekologis pohon pada ruang terbuka hijau di perumahan jakarta garden city, jakarta timur muhammad ravi novyandy*.
- Nugroho, V. C. (2015). *Evaluasi Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman*. 3(2), 114–121. <https://doi.org/10.18196/pt.2015.048.114-121>
- Nurhidayah. (2020). *Peranan Partisipasi Masyarakat Terhadap Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Wala*.
- Nurjannah Hamdani, Cici Nurfatimah, M. D. (2020). *Evaluasi Nilai Estetika Pada Taman Kencana di Bogor*. 03(01), 55–58.
- Nurliah, & Tajuddin, M. S. (2020). *Analisis Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pembangunan Kota di Kabupaten Majene*. 5, 71–82.
- Puspitasari, N. Z., Kumala, N. D., Putra, Y. R. K., & Alamiyah, S. S. (2022). *Partisipasi masyarakat dalam penataan ruang terbuka hijau di kelurahan gunung anyar surabaya*. 5(1), 85–92.
- Putri Siregar, T., Yuninndyawati, & Nengyanti. (2021). *Partisipasi Masyarakat dalam Kelompok Kegiatan Program Kampung KB Makmur Desa Arisan Gading, Kabupaten Ogan Ilir*. 7, 173–180. <https://doi.org/10.33369/jsn.7.1.173-180>
- Sahalessy, A., Krisantia, I., & Budiyantri, R. B. (2022). *Evaluasi Ketersediaan*

- Ruang Terbuka Hijau Publik Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 di Kecamatan Gambir , Jakarta Pusat. 5, 283–288.*
- Sari, I., Hidayat, T., Biyatmoko, D., & Suyanto. (2019). *Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Rantau Baru di Kota Rantau Provinsi Kalimantan Selatan. 7(2), 120–130.*
- Sari, S. R., Iswanto, D., & Indrosaptono, D. (2016). *Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Kota yang Sehat Studi Kasus : Kawasan Kota Lama Semarang. 16(2), 81–85.*
- Setiawan, A., & Widiyastuti, D. (2018). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. 1–10.*
- Setiawan, M. R., Hardiana, A., & Rahayu, P. (2023). *Fungsi ekonomi hutan kota (studi kasus : Hutan Kota Sangga The economic function of urban forest (case study : Sangga Buana City Forest ,. 18. <https://doi.org/10.20961/region.v18i1.47791>*
- Suciyani, W. O. (2018). *Analisis Potensi Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kampus di Politeknik Negeri Bnadung). 15(1), 17–33.*
- Tanjung, N. S., Sadono, D., & Wibowo, C. T. (2017). *Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Nagari di Sumatera Barat. 13(1).*
- Vada, W. A. (2015). *Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. 2(1), 1–12.*
- Wijayanto, H., & Hidayati, R. K. (2017). *Implementasi Kevijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta. 2(April).*
- Zaman, A. Q., & Khaq, M. Z. (2023). *Analisis Politik Ruang Terbuka Hijau : Studi Kasus Pada Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. 3(2), 97–113. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/politique.2023.3.2.97-113>* ANALISIS

LAMPIRAN

1. UPT DLH Kebun Raya Gunung Tidar

Yth. Satriyo

Teknisi Pengelolaan Kebun Raya



2. Ketua RW 10

Yth. Supriyanto



3. Ketua RW 6

Yth. Kuat Santoso, S.M



4. Pedagang

Mb Ayuk



5. Pengunjung

Yth. Lestari



6. Masyarakat (Pedagang)

Yth. Didi



CURICULUM VITAE

Nama : Fitria Ulfarisa
TTL : Magelang, 6 Desember 2002
Alamat : Bledar, Ngasinan, Grabag, Magelang, Jawa Tengah
NIM : 2106016142
Jurusan : S1-Ilmu Politik
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
IPK : 3,80
Agama : Islam
Email : fitriyarisa91@gmail.com
HP : 088221087757

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri Ngasinan 1
2. MTS Negeri 4 Magelang
3. SMK Negeri 2 Kota Magelang
4. S1 Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

RIWAYAT ORGANISASI

1. Anggota Divisi Komunikasi dan Informasi – HMJ Ilmu Politik 2022
2. Ketua Divisi Komunikasi dan Informasi – HMJ Ilmu Politik 2023
3. Menteri Komunikasi dan Informasi – DEMA FISIP 2024
4. Sekretaris UKM – Fisip Sport Club 2024